

**STUDI IMPLEMENTASI PROYEK  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOMULYO  
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**SODIKIN  
D4E002113**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2005**

**STUDI IMPLEMENTASI PROYEK  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOMULYO  
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**SODIKIN**

**D4E002113**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 27 Desember 2004

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/ Pembimbing I,

Drs. Hj. Endang Larasati, M. S

Anggota Tim Penguji lain :

1. Drs. Wahyu Pujoyono, SU

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II,

Drs. Slamet Santoso, M.Si

2. Drs. Hardi Warsono, M. TP

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

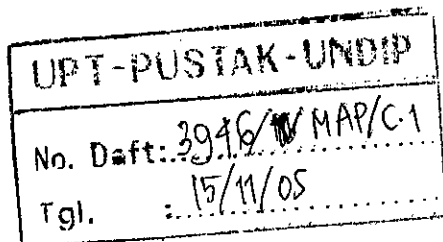
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : 27 Desember 2004

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D.



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau ditebitkan orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Desember 2005



SODIKIN

## RINGKASAN

JUDUL : STUDI IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)

NAMA : SODIKIN

NIM : D4E002113

Kemiskinan merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh pembangunan, artinya suatu negara yang melaksanakan pembangunan pada prinsipnya ditekankan pada bagaimana dapat menurunkan atau menanggulangi masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan adalah suatu masalah yang sifatnya kompleks dan multidimensional menyangkut dimensi politik, sosial, ekonomi, dan aset. Mencermati persoalan kemiskinan tersebut maka bentuk solusinya adalah salah satunya dengan paradigma pemberdayaan. Aplikasi dari paradigma tersebut adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu proyek pemerintah yang diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dikantong-kantong kemiskinan di perkotaan diberikan kepada penduduk miskin kota. Dalam penelitian ini mengambil lokus di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan fokus penelitian pada daya kerja implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah kurang tingginya daya kerja implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang ditandai oleh kurang maksimalnya kinerja Badan Swadaya Masyarakat (BKM), adanya kegiatan fisik yang belum tepat sasaran, dan kurangnya partisipasi warga yang lokasinya tidak menjadi kegiatan proyek serta adanya kriteria yang kurang jelas dan tidak diputuskan lewat Forum BKM siapakah warga miskin yang menerima proyek. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab dari hal tersebut di atas adalah kurang sesuainya antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana, kurang sesuainya antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan, dan kurang sesuainya antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan diterimnya hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis minor, terdapat hubungan positif dan signifikan antara (1) persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi sebesar  $tX1$  sebesar 0, 715. (2) kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi  $tX2$  sebesar 0, 565. (3) sarana penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi  $tX3$  sebesar 0, 599. (4) proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi  $tX4$  sebesar 0, 580. (5) hasil proyek dengan daya kerja implementasi  $tX5$  sebesar 0, 738, dan (5) kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi  $tX2$  sebesar 0, 736. Terdapatnya hubungan kesesuaian antara (1) persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi sebesar  $X^2$

sebesar 117, 975 dengan sig 0, 000. (2) sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi sebesar  $X^2$  sebesar 126, 897 dengan sig 0, 000, dan (3) hasil proyek dan kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi sebesar  $X^2$  sebesar 145, 850 dengan sig 0, 000. Hipotesis mayor, terdapat hubungan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana, kesesuaian antara sarana pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan, dan hubungan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi  $W$  sebesar 0, 876 dengan sig 0, 000. Kemudian hasil diskusi menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian di lapangan terlihat dari diterimanya hipotesis penelitian yang diajukan yang diperkuat dengan analisis kualitatifnya. Variabel yang dianggap paling dominan mempunyai hubungan secara yaitu (1) hasil proyek dengan daya kerja implementasi, (2) kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (3) persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi, (4) sarana penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi, (5) proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (6) kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi. Hipotesis minor, terdapat hubungan kesesuaian antara variabel  $X$  dengan variabel  $Y$  yang mempunyai hubungan kesesuaian yang paling positif dan signifikan secara berurutan, yaitu (1) kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (2) kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (3) kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan pelaksana dengan daya kerja implementasi.

Implikasi yang muncul adalah apabila variabel-variabel independen ( $X$ ) yang dianggap dominan mempunyai hubungan dengan daya kerja implementasi tidak segera dilakukan perbaikan maka akan menimbulkan peluang daya kerja implementasi yang makin rendah. Oleh karena itu, perbaikan terhadap variabel-variabel independen ( $X$ ) tersebut perlu dilakukan sehingga menimbulkan suatu kondisi-kondisi yang menunjukkan adanya daya kerja implementasi P2KP yang makin tinggi.

Penulis,  
  
SODIKIN

## ABSTRAKSI

Oleh Sodikin, 2004, STUDI IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)

Kata kunci : Daya kerja implementasi, persyaratan proyek, kemampuan organisasi pelaksana, sarana penyaluran aspirasi, proses pengambilan keputusan, hasil proyek, dan kebutuhan kelompok sasaran.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kesesuaian persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2), kesesuaian sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4), serta kesesuaian hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tingginya daya kerja implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang disebabkan oleh kurang sesuainya persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana, kurang sesuainya sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan, dan kurang sesuainya hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran. Variabel independen yang dianggap mempunyai hubungan yang paling positif dan signifikan dengan daya kerja implementasi adalah hasil proyek (X5) dan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6).

## ABSTRACT

By Sodikin 2004, IMPLEMENTATION STUDY OF POVERTY OVERCOMING PROJECT IN CITY (CASE STUDY IN TLOGOMULYO DISTRICT, PEDURUNGAN, SEMARANG)

Keyword : Implementation of working power, project recruitment, the ability of organisation doer, the facility of aspiration delivering, the process of decision making, the result of the project, and the needs of objective group.

The aim of the research is to know how big is the relation between project requirement harmony (X1) and the ability of organisation doer (X2), the harmony of the facility aspiration delivering (X3) and the process of decision taking (X4), and the harmony of project result (X5) and the need of objective group (X6) with implementation of working power (Y).

The result of the research shows that the less of working power of implementation the project of poverty overcoming in city (P2KP) in Tlogomulyo district, Pedurungan, Semarang is caused by the less harmony of project recruitment and the ability of working doer, the less harmony of aspiration delivering facility and the process of decision taking, and the less harmony of project and the needs of objective group. Independent variable considering having positif and signifikan relationship with implementing working power is project result (X5) and the harmony less between the project result (X5) and the needs of objective group (X6).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “STUDI IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOMULYO, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG)”.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga tersusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph. D selaku Ketua Program Studi MAP Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Larasati, M. S, selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Drs. Slamet Santoso, M. Si, selaku Dosen Pembimbing II, Bapak Drs. Wahyu Pujoyono, SU dan Drs. Hardi Warsono, M. TP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan bagi penulisan tesis ini.
3. Lurah Kelurahan Tlogomulyo Bapak Reson, S. Sos selaku pihak yang mengijinkan penulis meneliti di wilayah kerjanya.
4. Mohammad Imam Santoso, S. Sos selaku fasilitator P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, Bapak Putut Waringinjati, Anggota BKM “Dadi Mulyo”, Bu Rina dan Bapak Abdul selaku pelaksana kegiatan ekonomi produktif atas segala bantuanya.
5. Ibuku tercinta almarhum dan keponakanku tercinta Cung Annas yang telah mendahului saya pada saat masih menempuh kuliah dan dalam pembuatan tesis atas segala inspirasinya.
6. Bapaku tercinta dan Adiku tercinta Nok Ameliyah, atas segala bantuanya baik materiil maupun dorongan semangatnya
7. Teman-temanku mahasiswa MAP Angkatan VIII Reguler Tahun 2003 yang telah belajar bersama di MAP Universitas Diponegoro.

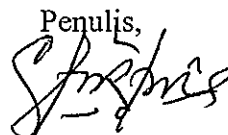


8. Adik-adiku di kampus Rino “Indrianto” Nugroho dan Ponco makasih atas bantuannya menemani Abang dalam pencarian data, mengurus ijin, dan menyebar kuesioner, Mas Didik dan anak-anak “PT-7 Comp” atas bantuan komputernya. Kemudian De’ Puteri Chantique, anak-anak “Cafe Taman”, Izal (Ustad), Argo, Didik and Djeng Lita, anak-anak “Rumah Singgah”, Anak-anak “Kaja” (Cafe Jahanam) atas permainan kartunya serta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Semarang, 27 Desember 2004

Penulis,



SODIKIN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	13
B. 1. Identifikasi Masalah .....	13
B. 2. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
C. 1. Tujuan Umum Penelitian .....	16
C. 2. Tujuan Khusus Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	18

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Landasan Teori .....	19
B. Variabel-variabel Penelitian .....	24
B. 1. Daya Kerja Implementasi (Y) .....	24
B. 2. Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2).....	26
B. 3. Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan (X4).....	34
B. 4. Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6).....	39
C. Hipotesis.....	42
C. 1. Hipotesis Verbal.....	42
C. 2. Hipotesis Geometrical.....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>46</b>
A. Rancangan Penelitian.....	46
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Variabel Penelitian.....	47
D. 1. Klasifikasi Variabel .....	47
D. 2. Definisi Konseptual .....	48
D. 3. Definisi Operasional .....	48
D. 3. 1. Daya Kerja Implementasi (Y) .....	48

D. 3. 2. Persyaratan Proyek (X1) .....	50
D. 3. 3. Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2).....	51
D. 3. 4. Sarana Penyaluran aspirasi (X3).....	51
D. 3. 5. Proses Pengambilan Keputusan (X4).....	52
D. 3. 6. Hasil Proyek (X5) .....	53
D. 3. 7. Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) .....	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Instrumen Penelitian .....	56
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	57
H. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	60
I. Teknik Analisis Data .....	61
J. Teknik Pengujian Hipotesis.....	63

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL**

<b>PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. 1. Keadaan Geografis.....	68
A. 2. Keadaan Demografi.....	69
A. 3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya .....	70
<b>B. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
B. 1. Identitas Responden .....	74
B. 2. Daya Kerja Implementasi (Y) .....	77
B. 3. Persyaratan Proyek (X1) .....	87

B. 4. Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2).....	93
B. 5. Sarana Penyaluran aspirasi (X3) .....	100
B. 6. Proses Pengambilan Keputusan (X4).....	104
B. 7. Hasil Proyek (X5).....	111
B. 8. Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) .....	116
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	122
C. 1. Analisis Kuantitatif .....	125
C. 1. 1. Hubungan antara Persyaratan Proyek (X1) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) ...	125
C. 1. 2. Hubungan antara Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	126
C. 1. 3. Hubungan antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	128
C. 1. 4. Hubungan antara Proses Pengambilan Keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	130
C. 1. 5. Hubungan antara Hasil Proyek (X5) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	131
C. 1. 6. Hubungan antara Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	133

C. 1. 7. Hubungan Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	134
C. 1. 8. Hubungan Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	136
C. 1. 9. Hubungan Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) ....	138
C. 2. Analisis Kualitatif .....	140
C. 3. Pengujian Hipotesis .....	143
C. 3. 1. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Persyaratan Proyek (X1) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	143
C. 3. 2. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)..	144
C. 3. 3. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	144

C. 3. 4.	Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Proses Pengambilan Keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	145
C. 3. 5.	Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Hasil Proyek (X5) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	146
C. 3. 6.	Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	146
C. 3. 7.	Analisis Chi-Square Test Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	147
C. 3. 8.	Analisis Chi-Square Test Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) .....	148
C. 3. 9.	Analisis Chi-Square Test Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)..	148
C. 3. 10.	Analisis Koefisien Konkordansi Kendall Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2),	

Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan (X4), dan Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y).....	149
E. DISKUSI .....	150
<b>BAB V SIMPULAN dan SARAN.....</b>	<b>156</b>
A. SIMPULAN.....	156
B. SARAN.....	162

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERTANYAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1.	Skema Model Kesesuaian David C. Korten .....	23
Bagan IV. 1.	Skema Model Kesesuaian David C. Korten .....	151

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.	Kegiatan P2KP PJM I di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.....	9
Tabel I. 2.	KSM Penerima Bantuan P2KP PJM II Ekonomi Produktif di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.....	11
Tabel III. 1.	Sampling Frame Penerima P2KP di Kelurahan Tlogomulyo.....	58
Tabel III. 2.	Sampling Size Penerima P2KP di Kelurahan Tlogomulyo .	59
Tabel IV. 1.	Sebaran Penduduk Tlogomulyo Menurut Kelompok Umur	69
Tabel IV. 2.	Sebaran Penduduk Tlogomulyo Menurut Tingkat Pendidikan.....	70
Tabel IV. 3.	Sebaran Penduduk Tlogomulyo Menurut Mata Pencarian.....	71
Tabel IV. 4.	Sebaran Penduduk Tlogomulyo Menurut Agama dan Kepercayaan.....	72
Tabel IV. 5.	Sarana Pendidikan di Tlogomulyo.....	73
Tabel IV. 6.	Usia Responden.....	74
Tabel IV. 7.	Jenis Kelamin Responden.....	75
Tabel IV. 8.	Pendidikan Terakhir Responden.....	75
Tabel IV. 9.	Jenis Usaha Responden.....	76
Tabel IV. 10.	Kemampuan BKM Memberikan Kegiatan Fisik Kepada Masyarakat.....	77

Tabel IV. 11.	Kemampuan BKM Memberikan Kegiatan Sosial Kepada Masyarakat.....	78
Tabel IV. 12.	Kemampuan BKM Memberikan Kredit Kepada Masyarakat .....	78
Tabel IV. 13.	Keefektifan P2KP di Lokasi Sasaran Masyarakat Miskin.....	79
Tabel IV. 14.	Keefektifan P2KP Mengurangi Beban Kebutuhan Masyarakat Miskin.....	80
Tabel IV. 15.	Keefektifan P2KP Mengurangi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Masyarakat Miskin .....	80
Tabel IV. 16.	Keefektifan P2KP Mengurangi Kesulitan Ekonomi Masyarakat Miskin.....	81
Tabel IV. 17.	Persepsi Masyarakat Terhadap P2KP.....	82
Tabel IV. 18.	Kesadaran Penerima Proyek Terhadap P2KP.....	82
Tabel IV. 19.	Motivasi Penerima Proyek Berpartisipasi dalam Implementasi P2KP .....	83
Tabel IV. 20.	Kemampuan Organisasi Pelaksana Memberikan Keyakinan kepada Penerima Proyek bahwa P2KP tidak Hibah .....	84
Tabel IV. 21.	Keberhasilan P2KP Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.....	84
Tabel IV. 22.	Keberhasilan P2KP Menambah Kesadaran Mengenai Kapasitas Pribadi Masyarakat Miskin .....	85

Tabel IV. 23.	Klasifikasi Skor Variabel Daya Kerja Implementasi.....	86
Tabel IV. 24.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Daya Kerja Implementasi.	86
Tabel IV. 25.	Persyaratan Teknis Penerima Proyek.....	87
Tabel IV. 26.	Penerima Proyek Mengerti Persyaratan Teknis .....	87
Tabel IV. 27.	Persyaratan Teknis Mudah di Penuhi Penerima Proyek.....	87
Tabel IV. 28.	Kesungguhan Penerima Proyek Memenuhi Persyaratan Teknis.....	89
Tabel IV. 29.	Persyaratan Administrasi Penerima Proyek.....	89
Tabel IV. 30.	Penerima Proyek Mengerti Persyaratan Administasi .....	90
Tabel IV. 31.	Persyaratan Administrasi Mudah di Penuhi Penerima Proyek .....	90
Tabel IV. 32.	Kesungguhan Penerima Proyek Memenuhi Persyaratan Administrasi.....	91
Tabel IV. 33.	Klasifikasi Skor Variabel Persyaratan Proyek.....	92
Tabel IV. 34.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Persyaratan Proyek.....	92
Tabel IV. 35.	Kemampuan Anggota BKM Menyampaikan Informasi P2KP .....	93
Tabel IV. 36.	Intensitas Anggota BKM Memberikan Informasi P2KP.....	94
Tabel IV. 37.	Kemampuan Anggota BKM Menggerakan Partisipasi Masyarakat.....	94
Tabel IV. 38.	Komitmen Anggota BKM Memajukan Tujuan Kelompok Masyarakat Miskin.....	94

Tabel IV. 39.	Kepedulian Anggota BKM Memecahkan Masalah Masyarakat Miskin.....	95
Tabel IV. 40.	Dukungan Finansial Anggota BKM Melaksanakan P2KP..	96
Tabel IV. 41.	Kelayakan Insentif yang Diterima Anggota BKM .....	96
Tabel IV. 42.	Dukungan Sarana dan Prasarana Anggota BKM Melaksanakan P2KP .....	97
Tabel IV. 43.	Klasifikasi Skor Variabel Kemampuan Organisasi Pelaksana.....	98
Tabel IV. 44.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Kemampuan Organisasi Pelaksana.....	99
Tabel IV. 45.	Pengetahuan Penerima Proyek Terhadap Sarana Penyaluran Aspirasi .....	100
Tabel IV. 46.	Keinginan Penerima Proyek Memanfaatkan Sarana Penyaluran Aspirasi .....	101
Tabel IV. 47.	Keefektifan Sarana Penyaluran Aspirasi Memenuhi Keinginan Penerima Proyek .....	101
Tabel IV. 48.	Penguasaan Tokoh Masyarakat Terhadap Sarana Penyaluran Aspirasi .....	102
Tabel IV. 49.	Klasifikasi Skor Variabel Sarana Penyaluran Aspirasi.....	103
Tabel IV. 50.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Sarana Penyaluran Aspirasi .....	103
Tabel IV. 51.	Intensitas Pertemuan Mengungkap Masalah Masyarakat Miskin .....	104

Tabel IV. 52.	Kehadiran Masyarakat Miskin dalam Pertemuan P2KP .....	105
Tabel IV. 53.	Pemilihan Prioritas Masalah yang Dibutuhkan Masyarakat Miskin .....	105
Tabel IV. 54.	Konsistensi Masalah Diputuskan dalam Forum BKM .....	106
Tabel IV. 55.	Keberagaman Alternatif Penyelesaian Masalah .....	107
Tabel IV. 56.	Intensitas Usulan Masyarakat Miskin dalam Pertemuan Warga.....	107
Tabel IV. 57.	Prioritas Masalah Masyarakat Miskin Diputuskan dalam Pertemuan Warga.....	108
Tabel IV. 58.	Klasifikasi Skor Variabel Proses Pengambilan Keputusan .	109
Tabel IV. 59.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Proses Pengambilan Keputusan .....	110
Tabel IV. 60.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lokasi Masyarakat Miskin .....	111
Tabel IV. 61.	Kegiatan Fisik Sesuai dengan Rencana yang Ditetapkan dalam Proyek .....	112
Tabel IV. 62.	Kegiatan Sosial Mengurangi Kebutuhan Sosial Masyarakat Miskin.....	112
Tabel IV. 63.	Aktualisasi Masyarakat Miskin dalam Kegiatan Sosial Masyarakat.....	113
Tabel IV. 64.	Peningkatan Usaha Masyarakat Miskin.....	114
Tabel IV. 65.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin .....	115
Tabel IV. 66.	Klasifikasi Skor Variabel Hasil Proyek .....	115

Tabel IV. 67.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Hasil Proyek .....	116
Tabel IV. 68.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Fisik Masyarakat Miskin	116
Tabel IV. 69.	Kemudahan Penerima Proyek Mendapatkan Akses Ekonomi.....	117
Tabel IV. 70.	Kemudahan Penerima Proyek Menciptakan Lapangan Kerja Sendiri .....	118
Tabel IV. 71.	Terpenuhinya Kebutuhan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Miskin.....	118
Tabel IV. 72.	Meningkatnya Kapasitas Pribadi Masyarakat Miskin dengan Terpenuhinya Kebutuhan Aspirasi dan Partisipasi dalam Pelaksanaan P2KP.....	119
Tabel IV. 73.	Klasifikasi Skor Variabel Kebutuhan Kelompok sasaran....	120
Tabel IV. 74.	Rekapitulasi Penilaian variabel Kebutuhan Kelompok Sasaran .....	121
Tabel IV. 75.	Tabulasi Silang hubungan antara Persyaratan Proyek (X1) dengan Daya Kerja Implementasi (Y) .....	125
Tabel IV. 76.	Tabulasi Silang hubungan antara Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi (Y).....	126
Tabel IV. 77.	Tabulasi Silang hubungan antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dengan Daya Kerja Implementasi (Y) .....	128
Tabel IV. 78.	Tabulasi Silang hubungan antara Proses Pengambilan Keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi (Y).....	130

Tabel IV. 79.	Tabulasi Silang hubungan antara Hasil Proyek (X5) dengan Daya Kerja Implementasi (Y) .....	131
Tabel IV. 80.	Tabulasi Silang hubungan antara Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi (Y) .....	133
Tabel IV. 81.	Tabulasi Silang hubungan kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi (Y) .....	134
Tabel IV. 82.	Tabulasi Silang hubungan kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi (Y).....	136
Tabel IV. 83.	Tabulasi Silang hubungan kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi (Y).....	138
Tabel IV. 84.	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	152
Tabel IV. 85.	Hasil Analisis Kualitatif Penelitian.....	154



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam GBHN (1999, 54-55) dipendahuluan disebutkan:

Pembangunan yang terpusat yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi oleh kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi disegala bidang dilakukan untuk bangkit kembali memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Setidaknya GBHN tersebut nampaknya telah menyiratkan adanya suatu pengakuan bahwa paradigma pertumbuhan yang dikenal dengan istilah menetes kebawah telah membawa kegagalan dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Seorang pakar pembangunan **Moeljarto Tjokrowinoto (1996:120)** menyatakan penegasannya bahwa Indonesia dalam berbagai variasi penekanannya, sejak awal menganut strategi pertumbuhan dan sekaligus pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (*growth – cum – poverty alleviation and social equity*).

Berawal dari suatu kegagalan tersebut sebuah pemikiran yang kemudian muncul adalah pandangan untuk segera beralih pada paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pemberdayaan dalam pembangunan di Indonesia. Walaupun secara akumulatif terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi

yang rata – rata 7, 9 % pada tahun 1996 menurut Bank Dunia (Purbayu, 2003: 23) dan pendapatan perkapita penduduk mencapai \$ 1. 155 menurut Tambunan (Purbayu, 2003: 11) namun demikian jika dicermati indikator tersebut pada kenyataannya tidak menunjukkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Badai krisis ekonomi merupakan kondisi traumatik yang mungkin jangan sampai terulang lagi telah menyebabkan jumlah kemiskinan yang makin membengkak. Data dari BPS Bulan Agustus Tahun 2000, pada tahun 1999 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 37,5 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya mencapai 22,5 juta jiwa.

Melihat persoalan tersebut di atas, nampaknya persoalan kemiskinan tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh pembangunan, artinya disuatu negara yang melaksanakan pembangunan maka yang ditekankan adalah sejauhmana permasalahan kemiskinan dapat diturunkan atau di tanggulangi karena permasalahan kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional sebagaimana dikemukakan oleh Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 122-123), yaitu:

Kemiskinan bukanlah suatu sosok yang *amorphous*, tetapi merupakan suatu fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensioanal. Rendahnya tingkat hidup yang seringkali dijadikan alat pengukur kemiskinan, pada hakekatnya hanyalah merupakan suatu mata rantai dari sejumlah faktor yang mewujudkan sindroma kemiskinan. Dari segi politik ekonomi ini, kemiskinan dipandang sebagai konsekwensi kekayaan dan kekuasaan disatu pihak dan menumbuhkan masa pinggiran yang mempunyai posisi menawaryang lemah dilain pihak. Dari segi sosial ekonomi, profil kemiskinan juga merupakan produk dari dampak saring (*filtering-effect*) pelapisan sosial dan struktur akses dalam suatu masyarakat, yang menghambat peluang kaum miskin dalam memperoleh berbagai pelayanan dan buah pembangunan. Sementara itu, ekologi fisik juga dapat dijadikan katalis fenomena kemiskinan. Dalam kluster ekologi ini kemiskinan di interpretasikan sebagai fenomena fisik, teknis dan statistik: pertumbuhan penduduk yang tinggi: kerusakan lingkungan, tekanan yang menurunkan pada sumber yang menurunkan *carrying capacity*, keterisolasian dan seterusnya.

Apa yang dikemukakan oleh Tjokrominoto tersebut mengenai profil kemiskinan sejalan dengan apa yang tertera dalam pedoman umum P2KP Tahap II, kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat struktural dan multidimensional yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

- a. Dimensi politik, sering muncul tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
- b. Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin ke dalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka.
- c. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai pada batas yang layak.
- d. Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya

Melihat karakteristik kemiskinan tersebut maka penanggulangan kemiskinan dituju ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat, baik dilihat dari aspek keberdayaan kelembagaan maupun penguatan organisasi

masyarakat. Berdasarkan profil kemiskinan yang sifatnya struktural dan multidimensional tersebut maka dapat dikatakan persoalan kemiskinan bentuk solusinya adalah dengan paradigma pemberdayaan. Adapun aplikasi dari paradigma tersebut dalam hal untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut pemerintah berupaya memecahkannya dalam bentuk proyek-proyek pembangunan seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang target utamanya adalah wilayah kantong-kantong kemiskinan di pedesaan. Sedangkan untuk proyek pengentasan kemiskinan yang target utamanya penduduk miskin di perkotaan, pemerintah mengeluarkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ).

Tujuan dari P2KP ini adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan pengembangan perumahannya;
2. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya tidak berarti karena inflasi maupun masyarakat yang mengalami kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi;
3. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptable, inklusif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan

memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik;

4. Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin.

Sasaran P2KP adalah; (1) Masyarakat. Kelompok sasaran penerima manfaat P2KP adalah warga miskin perkotaan sesuai dengan rumusan miskin kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi, serta masyarakat yang telah kehilangan sumber nafkahnya dikarenakan krisis ekonomi, (2) Sasaran lokasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan P2KP Tahap I dilaksanakan mulai November 1999–November 2001, sedangkan P2KP Tahap II dilaksanakan Tahun 2002–2004 mencakup lebih dari 1300 kelurahan dan desa perkotaan yang tersebar di 59 kabupaten/ kota di 6 Propinsi Pulau Jawa yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat bersama Pemerintah Daerah. Lokasi sasaran P2KP ini secara umum terletak di pantai utara pulau Jawa (Pantura) meliputi propinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ditambah DI.Yogyakarta. P2KP Tahap I dan II ditunjukkan untuk penanggulangan kemiskinan bagi lebih 5 juta jiwa atau sekitar 1 juta KK masyarakat miskin di wilayah perkotaan di Pulau Jawa, yang memiliki pendapatan per kapita dibawah upah minimum regional.

Untuk P2KP Tahap II di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Tlogomulyo dengan jumlah penduduk 4. 805 jiwa, mendapat bantuan

proyek Rp. 100. 000.000, 00 dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Prasarana Wilayah yang berupa dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada masyarakat kelurahan penerima yang pengelolaanya dipercayakan ke organisasi masyarakat yang dibentuk secara demokratis dan transparan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Adapun beberapa hal yang dibiayai oleh BLM adalah sbb:

1. Hibah, penggunaan dana hibah tersebut hanya untuk kegiatan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi kepentingan serta kebutuhan riil masyarakat langsung yaitu hibah untuk pembangunan pelayanan prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman, hibah yang sifatnya untuk membangun kapasitas dan daya saing kelompok masyarakat miskin dalam hal ini pelatihan-pelatihan, hibah untuk santunan fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lain.
2. Pinjaman (kredit mikro), yaitu: pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk usaha produktif termasuk kredit mikro perumahan atau perbaikan rumah dan atau perbaikan ketrampilan yang langsung terkait dengan kegiatan usaha tersebut dengan batas pinjaman pertama kali Rp. 500. 000, 00 dan maksimal pinjaman 2 juta rupiah.

Dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo tersebut ada beberapa tahapan penting yang dilalui, prosesnya meliputi:

1. Sosialisasi P2KP, merupakan tahapan memperkenalkan proyek kepada warga setempat oleh Tim Fasilitator Proyek, meliputi materi: tujuan proyek, sasaran, pelaksana dan bagaimana gambaran pelaksanaannya secara umum.
2. Kontrak Sosial, merupakan tahapan dalam usaha menciptakan kesepakatan adanya proyek di wilayah tersebut antar warga dengan fasilitator proyek setelah proyek tersebut disepakati oleh warga setempat.
3. Pembentukan kader, merupakan tahapan untuk mencari dan menerima kader yang secara sukarela membantu implementasi P2KP di wilayah tersebut yang pada prinsipnya orang tersebut tidak di bayar.
4. Pemetaan, merupakan tahapan dalam implementasi proyek P2KP dalam rangka melakukan pengelompokan warga yang berjumlah antara 25–35 berdasarkan RT/ RW untuk mereflesikan masalah kemiskinan, kriteria kemiskinan dan mencari solusinya serta untuk merumuskan organisasi swadaya masyarakat yang ideal bagi pelaksanaan P2KP tersebut.
5. Penyusunan Proyek Jangka Menengah (PJM) serta Proyek Tahunan Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat Setempat (PJM Pronakis dan Proyek Tahunan), meliputi, (1) PJM Pronakis (3 tahun), menentukan proyek jangka menengah penanggulangan kemiskinan setempat, (2) Proyek tahunan (1 tahun) merupakan rumusan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun pertama (rencana investasi dengan dana BLM), klasifikasi dan kesepakatan.
6. Rapat Warga Terbuka ( RWT ), merupakan tahapan dalam implementasi yang berupa pertemuan warga dalam rangka membuat AD/ ART sebagai pedoman dalam pelaksanaan P2KP di wilayah setempat.

7. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), merupakan tahapan dalam implementasi P2KP berupa pembentukan organisasi pelaksana P2KP yang berasal dari warga, oleh warga dan untuk warga.
8. BAPPUK, merupakan tahapan dalam implementasi untuk menentukan prioritas kegiatan P2KP di wilayah setempat.
9. Realisasi, merupakan tahapan dalam implementasi P2KP dimana rencana-rencana yang telah di sepakati di realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan proyek.

Berdasarkan hasil rapat BKM disepakati beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, yaitu:

1. Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani.
2. Pembayaran Tahap II (50 %) dilakukan apabila:
  - Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah dimanfaatkan,
  - Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK,
  - Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/ Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasikan KMW untuk memperoleh pembayaran tahap II

Pembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini;

3. Pembayaran Tahap III (30% atau yang tersisa) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutan dana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian,



pemeliharaan dan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjaman bergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan audit independen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat.

Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II.

Untuk menyelenggarakan P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, BKM di kelurahan setempat mendapat alokasi dana operasional awal BKM sebesar 5% dari total dana BLM sebesar Rp. 100 juta sesuai tertera dalam Pedoman Umum P2KP.

Berikut ini kegiatan P2KP di Kelurahan Tlogomulyo pada PJM I yang diprioritaskan pada kegiatan fisik dan sosial, dapat dilihat pada Tabel I. 1, yaitu:

Tabel I. 1  
KEGIATAN P2KP PJM I  
DI KELURAHAN TLOGOMULYO, KECAMATAN PEDURUNGAN,  
KOTA SEMARANG 2003–2004

N0	Nama KSM/ Panitia	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi dan Volume	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	BLM P2KP (Rp)	Swadaya (Rp)
1	Panitia Pavingisasi Jalan	Pavingisasi jalan/fisik	RW VII 1250m2	24.750.000	9.750.000	15.000.000
2	Panitia Perbaikan Jalan	Perbaikan jalan/fisik	RW V 300m2	3.500.000	2.500.000	1.000.000
3	Panitia Pavingisasi	Pavingisasi/fisik	RT 4 / X 480 m2	12.000.000	5.000.000	7.000.000
4	Panitia Bazaar	Santunan sosial, bazar/bazar	RW I sd XI	2.750.000	2.750.000	0
		Total		43.000.000	20.000.000	23.000.000

Sumber: Fasilitator P2KP Kelurahan Tlogomulyo, 2004

Dari tabel I. 1 tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan bahwa alokasi dana P2KP sebanyak Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk kegiatan yang sifatnya fisik dan sosial. Dana untuk kegiatan fisik digunakan untuk

pembangunan fisik yang berupa pavingisasi jalan di RW VII, RW V dan RW X, sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial berupa kegiatan santunan sosial dan bazar untuk seluruh warga Tlogomulyo yang miskin dari RW I sampai dengan RW XI.

Namun demikian ada hal yang perlu dicatat berdasarkan penuturan dari fasilitator dan anggota BKM yaitu untuk kegiatan P2KP yang sifatnya fisik terdapat lokasi yang seharusnya tidak dibangun kegiatan fisik, tetapi dibangun kegiatan fisik. Lokasinya merupakan daerah perumahan di RW VII dan RW X yang sebagian besar masyarakatnya lebih kaya bila dibandingkan dengan RW IV dan RW III yang sebagian besar masyarakatnya miskin. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan fisik ternyata partisipasi aktif warga dari RW-RW yang lain masih kurang, terlihat dari kegiatan fisik P2KP perbaikan jalan di RW V dan pavingisasi RW X berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban PJM I P2KP.

Selanjutnya berikut ini implementasi P2KP PJM II di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang diprioritaskan pada kegiatan ekonomi dalam hal ini pinjaman ekonomi produktif yang dapat dilihat pada tabel I. 2.

Tabel I. 2  
KSM YANG MENERIMA BANTUAN P2KP  
PJM II EKONOMI PRODUKTIF  
DI KELURAHAN TLOGOMULYO, KECAMATAN PEDURUNGAN,  
KOTA SEMARANG 2004-2005

No	Nama KSM	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi dan Volume	Nilai Usulan Kegiatan ( Rp )	BLM P2KP ( Rp )	Swadaya ( Rp )
1	MUGI RAHAYU	Ekonomi Produktif	RW-I/5	3,610,000	1,700,000	1,910,000
2	KELONTONG JAYA	Ekonomi Produktif	RW-I/5	4,005,000	1,875,000	2,130,000
3	LESTARI	Ekonomi Produktif	RW-I/4	3,565,000	1,725,000	1,840,000
4	SOFA MARWA	Ekonomi Produktif	RW-I/4	3,635,000	1,750,000	1,885,000
5	SUMBER REJEKI	Ekonomi Produktif	RW-I/4	3,035,000	1,425,000	1,610,000
6	SEKAR ARUM JAYA	Ekonomi Produktif	RW-I/4	3,930,000	1,750,000	2,180,000
7	MAWAR-1	Ekonomi Produktif	RW-III/7	5,655,000	2,675,000	2,980,000
8	BU WATIK	Ekonomi Produktif	RW-III/4	1,790,000	850,000	940,000
9	LANCAR	Ekonomi Produktif	RW-III/3	1,640,000	775,000	865,000
10	USAHA MANDIRI	Ekonomi Produktif	RW-III/3	2,115,000	1,025,000	1,090,000
11	CEMPAKA PUTIH	Ekonomi Produktif	RW-III/5	3,580,000	1,725,000	1,855,000
12	LENGKUAS	Ekonomi Produktif	RW-III/3	1,251,000	600,000	651,000
13	MARGIASIH	Ekonomi Produktif	RW-III/4	2,005,000	950,000	1,055,000
14	MELATI	Ekonomi Produktif	RW-III/4	4,600,000	1,650,000	2,950,000
15	DAHLIA-1	Ekonomi Produktif	RW-VIII/3	7,630,000	1,350,000	6,280,000
16	NUSA INDAH	Ekonomi Produktif	RW-VIII/4	3,095,000	1,400,000	1,695,000
17	PAK YUDI	Ekonomi Produktif	RW-VIII/4	4,145,000	1,400,000	2,745,000
18	RT-05 RW-IX	Ekonomi Produktif	RW-IX/5	6,030,000	2,150,000	3,880,000
19	RT-04 RW-IX	Ekonomi Produktif	RW-IX/7	6,105,000	2,850,000	3,255,000
20	SRI REJEKI	Ekonomi Produktif	RW-IX/5	4,640,000	2,175,000	2,465,000
21	JAYA	Ekonomi Produktif	RW-IX/6	5,410,000	2,600,000	2,810,000
22	BUNGA MENOR	Ekonomi Produktif	RW-X/7	5,770,000	2,675,000	3,095,000
23	ANGGREK	Ekonomi Produktif	RW-X/8	7,650,000	3,575,000	4,075,000
24	PANGAN SARI	Ekonomi Produktif	RW-X/5	4,858,000	2,250,000	2,608,000
25	DAHLIA-2	Ekonomi Produktif	RW-X/6	5,862,000	2,700,000	3,162,000
26	MAWAR-2	Ekonomi Produktif	RW-X/5	4,305,000	1,900,000	2,405,000
27	Biaya Operasional BKM			2,500,000	2,500,000	
				112,416,000	50,000,000	62,416,000

Sumber: BKM Kelurahan Tlogomulyo, 2004.

Dari tabel I. 2 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk implementasi P2KP PJM II dialokasikan dana P2KP sebesar Rp. 50.000.00, 00 untuk kegiatan ekonomi produktif yang berupa pinjaman kredit mikro secara bergulir bagi masyarakat miskin yang terbagi dalam 26 KSM atau 124 warga miskin/kk penerima. Ternyata RW X yang sebenarnya wilayah daerah perumahan

mendapatkan bantuan ekonomi produktif PJM II untuk 31 warga/ KK yang terbagi dalam 5 KSM. Untuk realisasi kegiatan ekonomi produktif dalam implementasinya berdasarkan penuturan dari warga mengalami kendala karena adanya persyaratan yang memberatkan yang berupa surat keterangan warga miskin, surat keterangan tidak punya usaha atau punya usaha dan surat pernyataan kesanggupan melunasi serta surat pernyataan tanggung renteng, dimana untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut calon penerima bantuan P2KP harus mengurusnya yang memerlukan waktu yang tidak singkat dengan mendatangi/ menunggu tim survai dan juga harus mengumpulkan calon anggotanya meminta kepastian kesepakatan tanggung renteng.

Kondisi-kondisi lainnya menyangkut implementasi P2KP adalah adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga pelaksana P2KP yang kinerjanya kurang maksimal. Kondisi tersebut ditandai adanya kekurangaktifan sebagian besar anggota BKM, dari 16 anggota BKM yang aktif hanya sekitar 4-6 anggota saja dan koordinator BKM-pun selaku pihak yang diserahi tugas untuk mengkoordinir implementasi P2KP berdasarkan informasi keaktifannya dinilai masih kurang. Penyebab dari ketidakaktifan tersebut terjadi karena munculnya persepsi bahwa mereka beranggapan kerjanya sangat berat akan tetapi imbalannya dapat dikatakan sangat minim dan mereka tidak diperkenankan untuk pinjam kegiatan ekonomi produktif serta mereka tidak suka pada mekanisme prosedural yang rumit mengenai mekanisme pencairan dana P2KP dan pembuatan laporan serta adanya ketakutan dari sebagian besar anggota BKM untuk menanggung resiko bilamana nantinya ketika bertugas mendapatkan masalah yang berat.

Disamping permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain dalam implementasi P2KP berupa kurang maksimalnya sarana penyaluran aspirasi dimana Forum BKM yang seharusnya menjadi forum dalam pengambilan keputusan ditingkat perwakilan warga kelurahan dalam implementasi P2KP tingkat frekuensi pertemuannya tidak rutin tetapi hanya sewaktu-waktu yaitu dilaksanakan apabila diperlukan, hal ini terjadi karena adanya sebagian besar anggota BKM yang tidak aktif padahal dalam pedoman umum P2KP disebutkan adanya rapat koordinasi triwulan BKM, KSM dan masyarakat. Fenomena lain dalam implementasi P2KP adalah adanya kegiatan yang tidak diputuskan melalui Forum BKM. Sebagai suatu contoh kasus kredit ekonomi produktif penentuan prioritas masyarakat miskin yang berhak menerima kredit hanya ditentukan sebagian saja oleh anggota BKM tanpa melalui forum BKM padahal dalam menentukan siapa warga miskin yang berhak harus melalui forum BKM yang didasarkan pada kriteria tertentu.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **B. 1. Identifikasi Masalah**

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasar pada latar belakang yang dikemukakan di atas penulis mengidentifikasi bahwa implementasi P2KP dinilai belum maksimal, terlihat dari kondisi-kondisi kinerja BKM yang kurang maksimal, kegiatan fisik yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya partisipasi warga diluar wilayah yang terkena proyek serta

tidak adanya kriteria yang jelas dan diputuskan lewat forum yang resmi mengenai siapa penerima kegiatan ekonomi produktif.

Gambaran mengenai implementasi proyek yang dinilai belum maksimal, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Kesesuaian persyaratan proyek dengan kemampuan organisasi pelaksana

P2KP adalah proyek pemerintah yang persyaratan proyeknya melalui mekanisme yang rumit baik untuk pelaksana dalam hal pencairan dana dan pelaporan maupun bagi penerima dalam hal memenuhi syarat mendapatkan bantuan proyek, sedangkan disisi lain BKM sebagai lembaga pelaksana proyek tidak jalan karena komitmen anggota yang kurang. Kondisi demikian tentunya akan menjadikan daya kerja proyek terganggu karena tidak adanya kondisi yang saling mendukung antara persyaratan proyek dan organisasi pelaksana proyek.

2. Kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi masyarakat dengan pengambilan keputusan organisasi

Sarana yang memegang legalitas formal dalam pengambilan keputusan adalah Forum BKM namun demikian yang terjadi sebagian besar anggota tidak aktif, hal ini menyebabkan seringkali pengambilan keputusan organisasi tanpa melalui forum tetapi lewat inisiatif anggota ataupun perintah dari koordinator BKM padahal BKM adalah institusi yang sifatnya kolegal. Kondisi ini tentunya ketika sarana tersebut tidak digunakan maka aspirasi masyarakat tidak terjadi.

## 2. Kesesuaian antara hasil proyek dengan kebutuhan kelompok sasaran

Sebuah proyek pembangunan dilaksanakan seharusnya mengacu pada apa yang dibutuhkan masyarakat miskin di wilayah tersebut, akan tetapi kondisi yang terjadi proyek yang seharusnya dibangun di wilayah miskin tetapi kenyataannya ada sebagian kegiatan fisik yang lokasinya di wilayah perumahan. Padahal wilayah perumahan tersebut kondisinya tidak lebih membutuhkan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih membutuhkan. Keadaan demikian tentunya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin tetapi hasil proyek dinikmati oleh masyarakat/ warga yang tidak lebih membutuhkan.

### B. 2. Perumusan Masalah

Masalah dapat muncul apabila terjadi keadaan dimana terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan atau direncanakan dengan apa yang terjadi. Berdasar dari identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

*“Apakah kurang tingginya daya kerja Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ada hubungannya dengan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2, kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) ?”*

## **C. Tujuan Penelitian**

### **C. 1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **C. 1.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara persyaratan proyek (X1) dengan daya kerja implementasi (Y).
2. Untuk mengetahui hubungan antara kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi (Y).
3. Untuk mengetahui hubungan antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dengan daya kerja implementasi (Y).
4. Untuk mengetahui hubungan antara proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y).
5. Untuk mengetahui hubungan antara hasil proyek (X5) dengan daya kerja implementasi (Y).
6. Untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y).
7. Untuk mengetahui hubungan antara kesesuaian persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi (Y).
8. Untuk mengetahui hubungan antara kesesuaian sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y).



9. Untuk mengetahui hubungan antara kesesuaian hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y).
10. Untuk mengetahui hubungan antara kesesuaian persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2), kesesuaian sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4), serta kesesuaian hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y).

#### C. 1. 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat akademis guna mendapat gelar S-2 yaitu Magister Sains (M. Si).
2. Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi implementasi kebijakan publik dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan P2KP dalam rangka perbaikan implementasi P2KP dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Dalam rangka mengkaji permasalahan di atas penulis berusaha mengkaji dari segi kebijakan publik yang ditekankan dalam konteks kajian implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik (*public policies*) sendiri oleh **Richard Rose (Dunn, 1998: 09)** merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Kemudian **Robert Denhart (1995: 5)** memberikan definisi kebijakan publik adalah pernyataan resmi dari pejabat-pejabat pemerintah yang *legitimate* tentang permasalahan publik.

Sementara itu **Thomas R. Dye (1978: 4)** mengemukakan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui pejabat-pejabatnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan warga negaranya.

Jadi secara jelas terlihat pada dasarnya kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk memperoleh tujuan pemerintah, yaitu merespon isu publik, mengatur sesuatu, dan juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tersebut dapat dipahami P2KP merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan publik yaitu masalah kemiskinan di perkotaan.

Selanjutnya mengenai studi implementasi kebijakan itu sendiri dapat digambarkan dalam pemaparan berikut ini:

**Solichin Abdul Wahab (2001: 61)** mengatakan studi implementasi kebijakan publik baru mulai diperhatikan oleh para ahli administrasi negara di Amerika Serikat dan Inggris pada awal 1970-an karena belum berhasilnya berbagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan reformasi kehidupan sosial.

Kemudian **Budi Winarno (2002: 10–102 )** mengatakan :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Secara sederhana apa yang dikemukakan Winarno dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi pada prinsipnya mengandung dua makna dasar yaitu bagaimana kebijakan bekerja dan bagaimana hasil yang ditimbulkan. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan tetapi terdapat perbedaan bahwa implementasi juga dilihat dari sisi *outcome*-nya. **Agus Dwianto (1999: 1)** mengemukakan implementasi kebijakan setidaknya bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu :

1. Dari sudut pandang proses, yaitu menekankan pada konsistensi pelaksanaan proyek atau kebijakan dengan *policy guidelines* yang merupakan petunjuk dari pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksanaan kelompok sasaran dan manfaat proyek. Program dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan *policy guidelines*.
2. Dari sudut pandang *outcome*, suatu proyek dikatakan berhasil kalau proyek tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan.

Kemudian Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2001: 65) merumuskan proses implementasi ini sebagai” *those action by publics or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut dapat dipahami bahwa proses implementasi berupa tindakan-tindakan yang diambil yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, menurut pendapat saya bahwa implementasi hanya mengandung dua makna dasar yaitu bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan hasilnya bagaimana, atau apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Sedangkan mengenai dampak (*impact*) itu sendiri merupakan suatu perubahan yang ditimbulkan bilamana kebijakan tersebut telah dilaksanakan / telah berakhir dan biasanya dilihat setelah minimal lebih satu tahun berjalan.

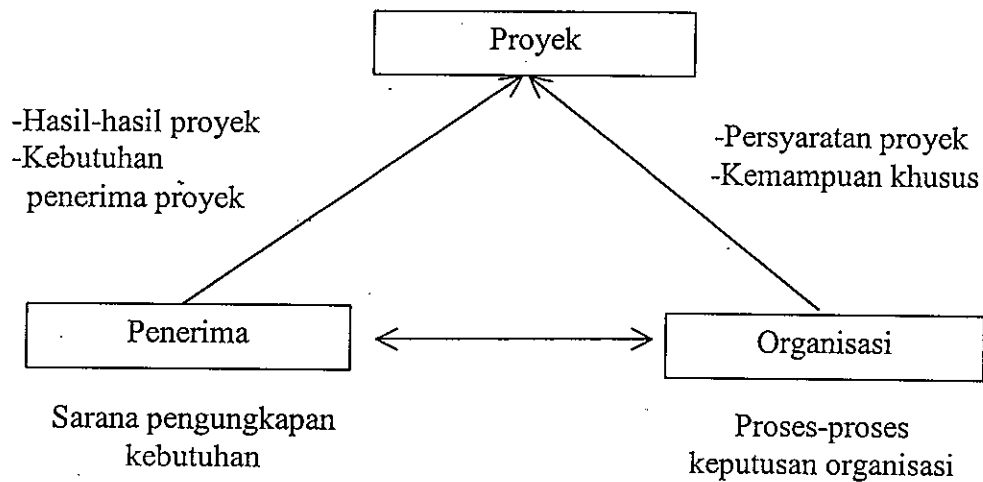
Berdasarkan paparan di atas tersebut, dalam mengkaji P2KP penulis mencoba melihat dari sisi implementasi kebijakan dengan teori David C. Korten sebagai landasanya yaitu berusaha melihat daya kerja implementasi kebijakan

dan variabel-variabel yang dianggap mempunyai hubungan dengan variabel daya kerja implementasi dengan timing implementasi kebijakan tersebut masih berjalan. Gambaran dalam rangka menelaah permasalahan P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

Menurut David C. Korten (Sjahrir, 1988: 261) bahwa pembangunan berdimensi kerakyatan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan materiil dan spirituil mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Dalam menentukan daya kerja proyek tidak hanya bertumpu pada satu sisi saja, tetapi memandang pada berbagai aspek yang saling berkaitan. Sebuah model kesesuaian (*The Fit Model*) disusun dengan pendekatan proses belajar. Model ini merupakan bentuk ideal yang dicapai oleh suatu program pembangunan yang berhasil. Gambaran skematis mengenai model kesesuaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II. 1  
SKEMA MODEL KESESUAIAN DAVID C. KORTEN



Sumber: Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan 1988.

Selanjutnya menurut David C. Korten (Sjahrir, 1988: 240-242), bahwa:

Daya kerja suatu proyek pembangunan adalah fungsi dari kesesuaian antara kelompok sasaran, proyek dan pelaksana. Dengan istilah yang lebih khusus proyek pembangunan akan gagal memajukan suatu kelompok jika tidak ada hubungan erat antara pihak penerima proyek dengan hasil proyek, persyaratan proyek dengan kemampun khusus dari organisasi pembantu dan sarana pengungkapan kebutuhan penerima proyek dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu.

## **B. Variabel-Variabel Penelitian**

### **B. 1. Daya kerja implementasi (Y)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), “daya” adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, sedangkan “kerja” adalah kemampuan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Jadi dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa daya kerja adalah bekerjanya fungsi-fungsi yang terkait dalam keseluruhan hubungan dan komponen yang ada di dalamnya sehingga akan diperoleh hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah daya kerja mempunyai makna dasar ganda yaitu proses bekerjanya sesuatu dan hasilnya itu sendiri dari bekerjanya sesuatu.

Definisi “proses” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), adalah (1) dua rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk, (2) runtutan perubahan (peristiwa) dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu.

Secara tradisional, proses didefinisikan oleh Tjiptono (1997: 28), sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersama-sama untuk mentransformasi input yang disediakan pemasok menjadi output yang diterima pelanggan.

Jadi dengan demikian dapat dipahami proses adalah seangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka mentransformasikan input menjadi output. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan proyek P2KP, proses ini berarti serangkaian aktifitas yang dilakukan dalam implementasi proyek P2KP



yang berupa transformasi input menjadi output, input disini adalah proyek P2KP.

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) “berhasil” didefinisikan sebagai: (1) mendatangkan hasil; ada hasilnya, (2) beroleh hasil; tercapai maksudnya.

Dalam pengertian tersebut maka berhasil merupakan suatu kondisi ketika objek dijalankan menghasilkan sesuatu, sehingga jika dikaitkan dengan implementasi P2KP, ketika implementasi P2KP terjadi maka implementasi P2KP tersebut mendatangkan hasil atau beroleh hasil.

Dengan demikian, dapat di ambil definisi konseptual daya kerja implementasi proyek adalah kemampuan proyek dalam melakukan implementasi proyek untuk mencapai tujuan-tujuan dari proyek secara maksimal.

Sementara itu, menurut Coraly Bryant (Bryant dan White, 1988), bahwa keberhasilan proyek pembangunan dapat dilihat dari efisiensi proyek sebagai daya kerja yang mampu menciptakan:

1. Seberapa jauh proyek mengembangkan lembaga yang mampu menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan baru dari waktu ke waktu.
2. Keefektifan proyek dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang jelas dan tertentu.
3. Banyaknya perilaku yang terjadi.
4. Apakah organisasi telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan.
5. Apakah proyek berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri.

Berdasarkan pendapat dari Coraly Bryant tersebut maka dapat dirumuskan indikator-indikator dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat seberapa jauh proyek menciptakan lembaga yang mampu meningkatkan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat miskin.
2. Tingkat keefektifan proyek dalam menjangkau kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin
3. Tingkat banyaknya perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat miskin.
4. Tingkat organisasi proyek telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan.
5. Tingkat telah berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri.

#### B. 2. Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2)

Sebuah proyek pembangunan memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik persyaratan-persyaratan bagi para pelaksananya maupun persyaratan bagi penerimanya. Disamping itu proyek juga harus dilaksanakan oleh organisasi pelaksana proyek yang mempunyai kemampuan yang memadai dalam rangka melaksanakan proyek dilapangan, karena dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima proyek maka organisasi pelaksana mempunyai kewajiban membantu atau mengurus, dan menentukan keputusan-keputusan pihak-pihak yang berhak menerima bantuan proyek yang berkaitan dengan persyaratan tersebut. Kemampuan tersebut tentunya berkaitan dengan pelaku dalam organisasi yang memiliki

kemampuan ataupun kecakapan khusus yang berhubungan dengan proyek yang ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan dimotivasi oleh insentif yang layak. Jika kondisi tersebut terlaksana maka peluang terjadinya daya kerja proyek yang maksimal dalam implementasinya lebih mungkin terjadi sehingga secara nyata diharapkan akan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan implementasi P2KP.

Disamping itu, kemampuan yang memadai dari organisasi dibutuhkan dalam hal mensosialisasikan persyaratan proyek kepada masyarakat penerima proyek dan melaksanakan persyaratan proyek seperti survey lapangan ke masyarakat miskin, inventarisir calon penerima proyek, dan menentukan indikator-indikator persyaratan proyek sehingga jika hal ini dilakukan maka diharapkan persyaratan proyek bagi masyarakat realistis dan mudah dipenuhi sehingga daya kerja proyek dalam implementasi maksimal dan tentunya harapan suksesnya implementasi semakin berpeluang terjadi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas tersebut maka kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana harus terjadi dalam rangka memberikan sumbangan bagi daya kerja proyek yang maksimal dalam implementasi sebuah proyek pembangunan.

Berikut ini, uraian mengenai variabel persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) yang dapat dilihat dibawah ini:

### B. 2. 1. Persyaratan Proyek (X1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) “syarat” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki), sedangkan “persyaratan” adalah hal-hal yang menjadi syarat.

Dari definisi di atas tersebut maka dapat di ambil definisi persyaratan proyek adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi yang menjadi syarat dalam pelaksanaan suatu proyek.

Suatu kebijakan ketika akan diimplementasikan memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti persyaratan khusus bagi pelaksananya maupun persyaratan khusus bagi pihak yang diberi kebijakan. Persyaratan-persyaratan proyek tersebut biasanya dirumuskan dalam petunjuk pelaksanaan kebijakan publik. Hal demikian ini penting dilakukan untuk menjamin adanya implementasi yang lancar sehingga peluang terjadinya implementasi kebijakan yang efektif lebih besar. Proyek pembangunan yang sudah dirumuskan, jika akan dilaksanakan maka harus didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam rumusan proyek tersebut.

Dalam kaitanya dengan persyaratan proyek ini, di P2KP disebutkan persyaratan teknis dan administrasi pencairan dana BLM (Bantuan langsung Masyarakat) dalam pedoman umum P2KP. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain:

1. Masyarakat kelurahan telah melakukan survey swadaya, pemetaan kemiskinan dan kebutuhan masyarakat.

2. Masyarakat kelurahan sasaran telah menyusun Rencana Proyek Penanggulangan Kemiskinan 3 tahun (PJM) dan Rencana Tahunan (untuk pencairan BLM Tahap I)
3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah terbentuk.
4. Proposal kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan diajukan untuk pencairan dana (untuk pencairan BLM Tahap I dan II) telah dinilai layak oleh UPK dan diverifikasi KMW menyangkut kesesuaian dengan prinsip P2KP.
5. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) telah ditandatangani oleh BKM dan KMW.
6. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) yang memuat antara lain jumlah dana dan penggunaannya telah ditandatangani oleh BKM dan Penanggungjawab Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
7. BKM telah diaktenotaris-kan
8. BKM telah membuka rekening bank berdasarkan akte notaris.

Disamping persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan proyek, juga terdapat kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh penerima proyek yaitu kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh anggota KSM sebagai warga miskin yang mendapat bantuan proyek, khususnya kegiatan ekonomi produktif, yaitu antara lain:

1. Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat.

2. Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran proyek pinjaman bergulir P2KP.
3. Dapat dipercaya dan bekerjasama dengan anggota lain
4. Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan diteruskan ke bank terdekat, atas nama KSM maupun pribadi.
5. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan kredit guna mengembangkan usahanya.
6. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha dan kesempatan kerja maupun peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin disekitarnya.
7. Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500. 000,00 dan maksimal tidak lebih dari Rp. 2.000. 000, 00- untuk tahap-tahap berikutnya.
8. Dalam tiga tahun terakhir belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, mengingat objek yang diteliti adalah warga masyarakat miskin maka nilai ukuranya yang diambil adalah kriteria kelayakan anggota KSM sedangkan indikatornya dari persyaratan proyek tersebut adalah:

1. Persyaratan teknis
2. Persyaratan administrasi

### B. 2. 1. Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2)

Dalam implementasi P2KP yang menjadi lembaga pelaksana proyek adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan organisasi masyarakat/ institusi lokal yang dibentuk, dimiliki, dikelola, dan diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama. BKM tersebut diberi kepercayaan dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu mengingat tugasnya yang berat tersebut adalah hal yang wajar jika BKM tersebut sebagai organisasi pelaksana proyek harus mempunyai kemampuan khusus sesuai dengan persyaratan tugas dari proyek dan mempertimbangkan kebutuhan penerima proyek dalam proses-proses keputusan organisasi. Uraian di atas menyangkut ketersediaan dan kelayakan sumber daya kebijakan yang memegang peran penting dalam ikut serta mendukung daya kerja proyek pembangunan khususnya sumber-sumber yang dimilikinya.

**Menurut George Edwards III (1980: 300),** sumber-sumber kebijakan adalah:

1. Staf yang cukup relatif jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan
2. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan pelaksanaan proyek
3. Adanya dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi
4. Adanya wewenang yang dimiliki untuk implementasi kebijakan
5. Fasilitas-fasilitas lainnya.

Sementara itu, faktor penting yang menentukan daya kerja suatu proyek adalah manusia karena manusia pada dasarnya adalah subjek yang membuat dan menjalankan sesuatu termasuk organisasi. Jadi dengan demikian keberhasilan suatu proyek pembangunan ditentukan oleh

kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut termasuk manusianya sebagai subjek yang menjalankan organisasi.

Kemampuan atau dalam bahasa Inggris menurut Webster New World (2001) disebut '*ability*' didefinisikan sebagai berikut :

1) *being able; power to do (something physical or mental)*, 2) *skill, expertness, or talent*.

Hal penting berkaitan kemampuan yang sesuai dengan definisi di atas, yaitu kecakapan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek-proyek yang telah diputuskan. Kemampuan selalu diidentikkan dengan kedudukan seseorang sehingga dalam proses pengembangan organisasi prinsip "*The Right Man On The Right Place*" dapat diterapkan.

Demikian pula halnya dalam pembangunan desa, menurut Hendrata (Tjahja Supriatna, 2000: 169) bahwa :

Kelompok masyarakat sebagai pioner pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mampu mengelola dan menjalankan proses pembangunan. Dalam konteks ini anggota kelompok swadaya masyarakat harus responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin di lingkungannya, partisipatif dan mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat. Usaha yang demikian ini merupakan proses perubahan yang lama dan menuntut kerja keras dan komitmen yang tinggi.

Disinilah dituntut adanya kemampuan administratif dari kelompok masyarakat. Menurut Gant (Tjahja Supriatna, 2000: 169) bahwa seseorang administrator harus mampu melaksanakan tugas administratif internal dan eksternal, yaitu:



1. Administrasi internal mencakup penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, sarana dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditugaskan.
2. Administrasi eksternal meliputi kegiatan-kegiatan dan proses administrasi dengan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok di luar pengendalian administratif dari suatu lembaga.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dirumuskan definisi konseptual organisasi pelaksana adalah jumlah dan kualitas personil, komitmen mereka terhadap keberhasilan proyek dan dukungan sumber daya lainnya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian P2KP tersebut, maka organisasi pelaksana ini merupakan para pelaksana proyek/ proyek yang bertugas menyampaikan proyek, mengadakan pertemuan, menentukan penerima proyek ataupun menggali potensi masyarakat penerima proyek khususnya masyarakat miskin kota yang didukung sumber daya lainnya dalam menciptakan daya kerja proyek pembangunan.

Kemudian yang menjadi indikator-indikatornya dari kemampuan organisasi pelaksana adalah :

1. Kemampuan menyampaikan informasi
2. Kemampuan menggerakkan partisipasi anggota kelompok.
3. Komitmen yang tinggi terhadap tujuan kelompok
4. Dukungan financial yang memadai dan insentif yang layak
5. Dukungan fasilitas-fasilitas yang memadai

B. 3. Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan keputusan (X4)

Sebuah proyek pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya memerlukan sarana penyaluran aspirasi yang merupakan wadah aspirasi masyarakat penerima proyek khususnya warga miskin, disamping itu dalam proyek pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat maka diperlukan proses pengambilan keputusan yang partisipatif sehingga masyarakat miskin akan ikut serta dalam proses pembelajaran dan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Jika sarana penyaluran aspirasi bagi warga miskin berfungsi secara aktif dan proses pengambilan keputusannya berlangsung secara partisipatif maka harapannya adalah daya kerja implementasi berlangsung secara maksimal dan hasil proyekpun berhasil secara maksimal pula.

Oleh karena itu, maka antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan harus sesuai demi terwujudnya daya kerja implementasi proyek yang maksimal dan tentunya juga hasil dari tujuan-tujuan dari diadakanya suatu proyek.

Berikut ini, uraian mengenai variabel kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) yang dapat dilihat dibawah ini:

### B. 3. 1. Sarana Penyaluran Aspirasi (X3)

Daya kerja suatu proyek akan maksimal mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari suatu proyek, jika masyarakat sebagai penerima proyek terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam implementasi proyek. Dalam konteks proses, implementasi proyek tersebut masyarakat miskin pada khususnya diberi kewenangan untuk merencanakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi, masalah setempat serta sumber kelembagaan yang ada.

**Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001)** “sarana” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

Selanjutnya menurut Korten (Tjahja Supriatna, 2000:166), bahwa kelompok masyarakat dapat mengetahui, belajar bersama masyarakat dan membangun pengetahuan baru dan kapasitas institusi berdasarkan tindakan.

Maksud dari pernyataan Korten tersebut pelibatan masyarakat dalam suatu proyek merupakan sebuah langkah untuk memberikan proses pembelajaran bagi mereka sehingga mampu membangun kapasitasnya dalam pembangunan.

Disamping itu menurut Korten (Tjahya Supriatna, 2000: 167) bahwa :

Belajar dari pengalaman dan kesalahan adalah istilah yang mungkin tepat untuk proses membangun kapasitas disini, karena kesalahan tidak dianggap sebagai suatu kegagalan atau sesuatu yang tidak pantas, tetapi sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan tindakan koreksi yang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Dalam pendekatan proses pembelajaran ini pengalaman-pengalaman diperoleh, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dikoreksi dan diskusikan. Secara bertahap maka masyarakat miskin bersama kelompok masyarakat dapat belajar efektif, belajar efisien dan akhirnya belajar mengembangkan diri.

Berdasarkan pendapat di atas, jadi dapatlah dipahami bahwa dalam proyek pembangunan masyarakat perlu dilibatkan dengan mengajaknya menghayati permasalahan yang dihadapi kemudian mencoba beberapa pendekatan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi bersama melalui keputusan-keputusan yang akan diambil oleh organisasi pelaksana atau kelompok masyarakat.

Jadi dengan demikian definisi konseptual dari sarana penyalur aspirasi adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan proyek yang berupa penggalan masalah dan mencari solusi bersama-sama sesuai dengan aspirasi atau keinginan dari masyarakat.

Adapun yang menjadi indikator dari variabel sarana penyaluran aspirasi adalah:

1. Bentuk- bentuk sarana penyaluran aspirasi
2. Tingkat efektifitas sarana penyaluran aspirasi bagi keinginan masyarakat miskin
3. Tingkat dominasi terhadap sarana penyaluran aspirasi

### B. 3. 2. Proses Pengambilan Keputusan (X4)

Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi banyak di pengaruhi oleh derajat gaya kepemimpinan. Menurut Fiedler (Miftah Thoha, 1990: 69-70), terdapat empat gaya dasar kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan, antara lain :

1. Instruksi  
Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bilamana, dan dimana melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin.
2. Konsultasi  
Pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi dalam hal ini diikuti dengan meningkatkan banyaknya komunikasi dua arah dan perilaku mendukung, dengan berusaha mendengar perasaan pengikut tentang keputusan yang dibuat, serta ide-ide dan saran-saran mereka. meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian (control) atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin.
3. Partisipasi  
Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan menggunakan gaya ini, pemimpin dan pengikut saling tukar-menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Komunikasi dua arah ditingkatkan, dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pengikut.
4. Delegasi  
Pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Sehingga bawahan memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara melaksanakan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan pertunjukan mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri.

Dalam implementasi P2KP proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif melalui (1) Forum Group Discussion (FGD) adalah forum diskusi mendalam untuk mendefinisikan kemiskinan, faktor penyebab dan mencari solusi pemecahannya, (2) Rapat warga Terbuka (RWT) merupakan tahapan dalam implementasi yang berupa pertemuan warga dalam rangka membuat AD/ ART sebagai pedoman dalam pelaksanaan P2KP di wilayah setempat, serta (3) Rapat BKM yang merupakan forum pengambilan keputusan dalam proyek untuk menentukan kegiatan P2KP. Dalam forum–forum pengambilan tersebut secara umum dilakukan melalui tahapan dalam pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, penentuan prioritas, penyajian alternatif, dan pengambilan keputusan.

Jadi berdasarkan uraian di atas tersebut dapat dirumuskan definisi konseptual proses pengambilan keputusan adalah suatu tahapan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi P2KP untuk mendapatkan solusi yang efektif.

Sedangkan yang menjadi indikatornya adalah :

1. Identifikasi dan perumusan permasalahan
2. Penentuan prioritas masalah yang perlu ditangani.
3. Penyajian alternatif-alternatif pemecahan masalah
4. Pengambilan keputusan.

#### B. 4. Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan

##### Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6)

Dalam proyek pembangunan hasil-hasil proyek yang terjadi harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sasaran proyek yaitu masyarakat miskin sebagai sasarannya. Jika hasil yang terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sasaran proyek maka daya kerja proyek yang terjadi dalam implementasi kebijakan menggambarkan adanya keberhasilan dari adanya proyek itu sendiri, artinya keberhasilan suatu proyek ditentukan oleh adanya seberapa baik daya kerja proyek dalam implementasi kebijakan suatu proyek pembangunan.

Oleh karena itu, antara hasil proyek dan kebutuhan sasaran proyek harus terjadi kesesuaian antara keduanya dalam implementasi proyek sebagai suatu gambaran adanya daya kerja proyek pembangunan yang berhasil.

#### B. 4. 1. Hasil Proyek (X5)

**Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001),** kata “hasil” mempunyai arti antara lain :

- Sesuatu yang diadakan oleh usaha
- Pendapatan atau perolehan
- Akibat

Sedangkan “proyek” menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001)** mempunyai arti sebagai rancangan mengenai usaha-usaha dan asas-asas yang akan dijalankan.

Alokasi dana P2KP dalam implementasinya digunakan dalam tiga bidang kegiatan yang meliputi (1) kegiatan fisik, (2) Kegiatan Sosial, dan (3) Kegiatan ekonomi produktif.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan definisi konseptual hasil proyek adalah sebagai sesuatu yang diadakan oleh proyek untuk memperoleh hasil atau akibat yang ditimbulkan setelah proyek tersebut dijalankan.

Sedangkan indikator-indikatornya adalah :

1. Hasil yang ditimbulkan secara fisik
2. Hasil yang ditimbulkan secara sosial
3. Hasil yang ditimbulkan secara ekonomi

#### B. 4. 2. Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6)

**Menurut Khairudin (1992: 36), bahwa :**

Secara konseptual bentuk dari kebutuhan manusia dibedakan atas kebutuhan fisiologis dan kebutuhan sosial psikologis. Kebutuhan fisiologis menuntut untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan mendapat prioritas tinggi, sedangkan kebutuhan sosial psikologis menuntut pemuasan dalam arti sosial dan prioritasnya lebih rendah.

Kemudian menurut **Hendra Asmara dan Bintoro Tjokroamidjojo (Khairudin, 1992: 38)**, kebutuhan dasar manusia dapat dibagi dua kategori sebagai berikut :

1. Kebutuhan dasar keluarga atau individu, seperti : pangan, perumahan, sandang dan beberapa peralatan rumah tangga.
2. Kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan, seperti air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.



Sedangkan menurut Dorodjatun Koentjoro Jakti (Sumardi dan Hans-dieter Evers, 1982:134), model kebutuhan dasar sebagai suatu strategi memenuhi lima sasaran pokok, yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan / perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu.
2. Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, proyek prefentif kuratif kesehatan air minum, pemukiman dengan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi baik rural maupun urban.
3. Dijamin hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa / perdagangan internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha.
5. Menjamin adanya partisipasi masa depan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan definisi konseptual kebutuhan kelompok sasaran adalah apa yang menjadi kebutuhan dari para anggota kelompok sasaran dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator-indikatornya adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran secara fisik
2. Terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan
3. Terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran untuk berpartisipasi dalam implementasi proyek

## C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut: .

### C. 1. Hipotesis Verbal

#### a. Hipotesis Minor

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara persyaratan proyek (X1) dengan daya kerja implementasi (Y)
2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi proyek (Y)
3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dengan daya kerja implementasi (Y)
4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y)
5. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara hasil (X5) dengan daya kerja implementasi (Y)
6. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kbutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y)
7. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi (Y).
8. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y).

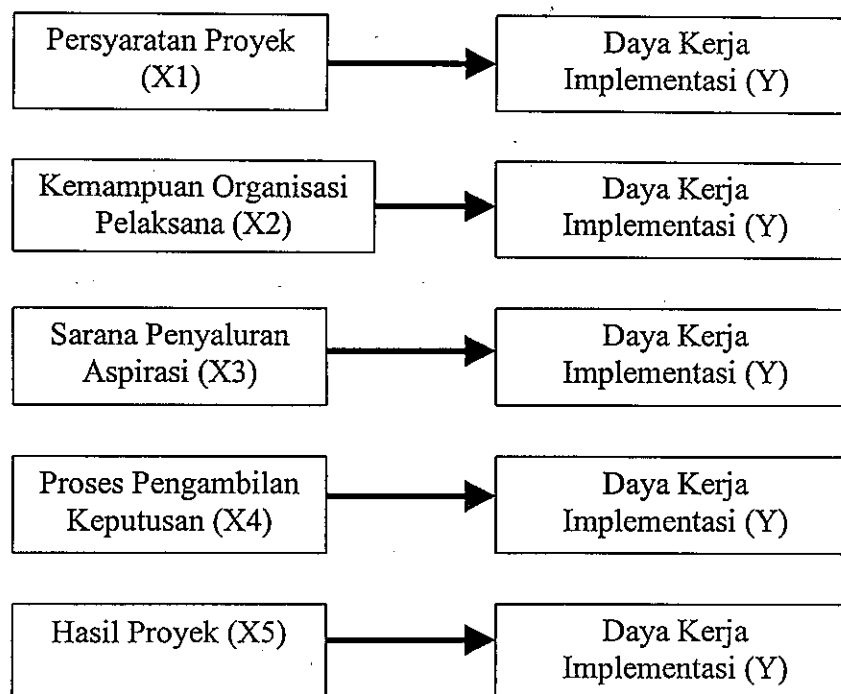
9. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y).

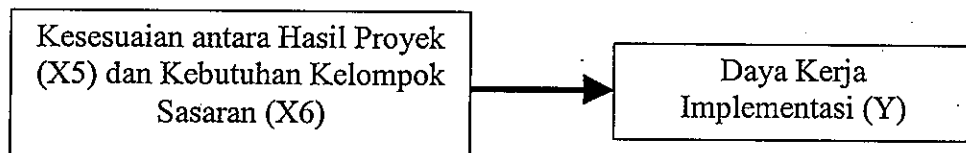
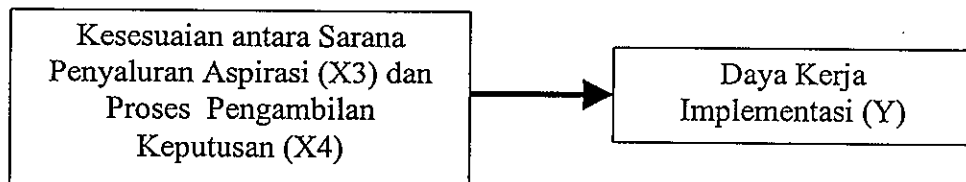
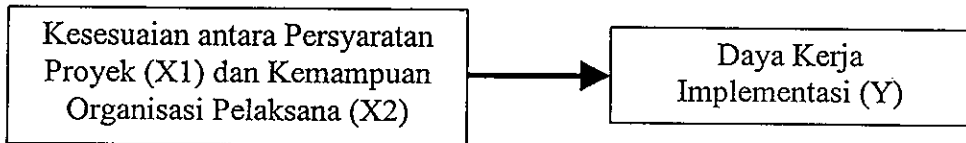
b. Hipotesis mayor

Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2), kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4), serta kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y)

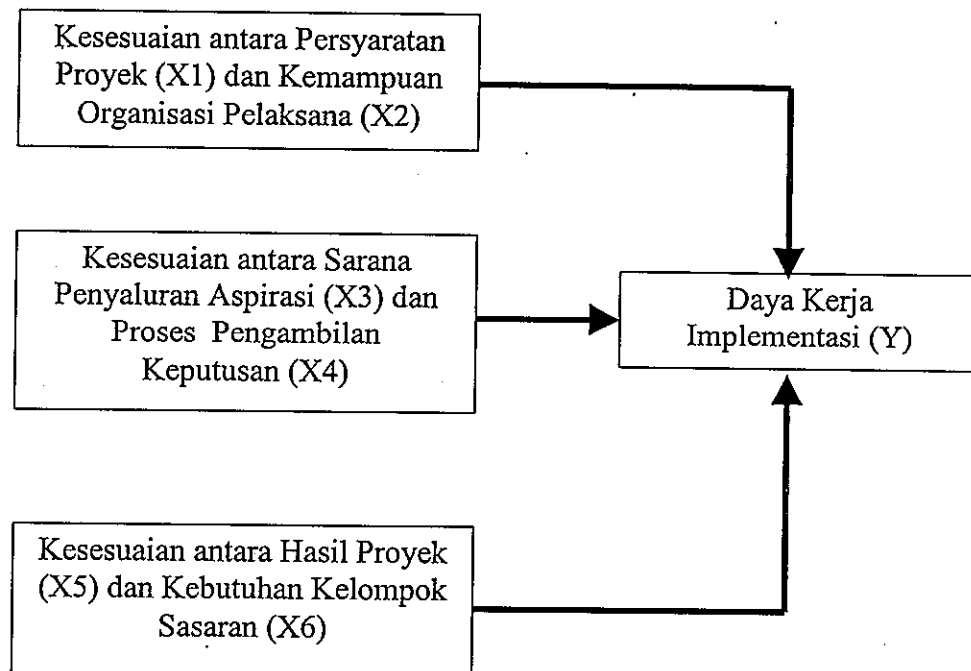
C. 2. Hipotesis Geometrical

a. Hipotesis Minor:





b. Hipotesis Mayor



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode diperlukan dalam suatu penelitian agar tujuan yang diinginkan berhasil dengan baik.

**Handar Nawawi (Koentjoroningrat, 1983: 61)** merumuskan metode sebagai berikut metode pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Maka langkah-langkah yang harus ditempuh harus relevan dengan masalah yang akan dirumuskan.

Metode juga mempunyai langkah-langkah pokok atau cara kerja yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian yang diselenggarakan sehingga mempunyai nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Rancangan Penelitian**

**Menurut Masri Singarimbun (1982: 3)**, tipe penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Tipe penelitian eksploratif atau tipe penelitian penjajakan. Penelitian penjajakan bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa
- b. Tipe deskriptif, penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan yang pertama adalah mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci eksplanatory/penjelasan
- c. Tipe penelitian eksplanatory/ penjelasan  
Penelitian ini menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang kami lakukan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang eksplanatory karena dalam penelitian ini peneliti berusaha mengetahui hubungan antar variabel.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitiannya adalah mengetahui daya kerja implementasi P2KP (Y) yang dihubungkan dengan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2), kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4), serta kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6).

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil locus (lokasi) di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

## **D. Variabel Penelitian**

### **D. 1. Variabel Penelitian**

#### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan proyek (X1)
- b. Kemampuan organisasi pelaksana (X2)
- c. Sarana penyaluran aspirasi (X3)
- d. Proses pengambilan keputusan (X4)

- e. Hasil proyek (X5)
- f. Kebutuhan kelompok sasaran (X6)

## 2. Variabel Terikat

Variabel terikat dari penelitian ini adalah daya kerja implementasi (Y).

### D. 2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Daya kerja implementasi (Y) adalah kemampuan proyek dalam melakukan implementasi proyek untuk mencapai tujuan-tujuan dari proyek secara maksimal.
- b. Persyaratan proyek (X1) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi yang menjadi syarat dalam pelaksanaan suatu proyek.
- c. Kemampuan organisasi pelaksana (X2) adalah jumlah dan kualitas personil, komitmen mereka terhadap keberhasilan proyek dan dukungan sumber daya lainnya.
- d. Sarana penyaluran aspirasi (X3) adalah sarana-sarana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek yang berupa penggalian masalah dan mencari solusi bersama-sama sesuai dengan aspirasi atau keinginan dari masyarakat.



- e. Proses pengambilan keputusan (X4) adalah suatu tahapan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi P2KP untuk mencapai solusi yang efektif.
- f. Hasil proyek (X5) adalah sebagai sesuatu yang diadakan oleh proyek untuk memperoleh hasil yang ditimbulkan setelah proyek tersebut dijalankan .
- g. Kebutuhan kelompok sasaran (X6) adalah apa yang menjadi kebutuhan dari para anggota kelompok sasaran dalam kehidupan sehari-hari.

#### D. 3. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daya kerja proyek (X1), indikatornya:
  - a. Tingkat seberapa jauh proyek menciptakan lembaga yang mampu meningkatkan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat miskin, diukur dari:
    - Tingkat P2KP menciptakan BKM yang mampu memberikan kegiatan fisik secara layak bagi masyarakat miskin
    - Tingkat P2KP menciptakan BKM yang mampu memberikan kegiatan sosial secara layak bagi masyarakat miskin
    - Tingkat P2KP menciptakan BKM yang mampu memberikan kegiatan ekonomi secara layak bagi masyarakat miskin
  - b. Tingkat keefektifan proyek dalam menjangkau kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin, diukur dari:

- Tingkat efektifitas proyek dilaksanakan dilokasi sasaran
  - Tingkat efektifitas proyek mengurangi beban kebutuhan masyarakat miskin
  - Tingkat efektifitas proyek mampu mengurangi permasalahan sarana dan prasarana masyarakat miskin
  - Tingkat Efektifitas proyek mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat miskin
- c. Tingkat banyaknya perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat miskin, diukur dari:
- Tingkat persepsi masyarakat terhadap proyek pembangunan
  - Tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya proyek pembangunan
  - Tingkat motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan
- d. Tingkat organisasi proyek telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan, diukur dari: .
- Tingkat organisasi proyek mampu memberikan keyakinan proyek tidak hibah
- e. Tingkat proyek telah berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri, diukur dari:

- Tingkat proyek mampu menggerakkan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan
- Tingkat proyek mampu memberikan keyakinan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjalankan proses hidupnya.

2. Persyaratan proyek (X1), indikatornya:

a. Persyaratan teknis, diukur dari:

- Macam-macam persyaratan teknis untuk mendapatkan proyek yang harus dipenuhi calon penerima P2KP apakah memberatkan
- Tingkat pengetahuan terhadap persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan proyek
- Tingkat kemudahan dalam memenuhi persyaratan teknis
- Tingkat kesungguhan dalam memenuhi persyaratan teknis proyek

b. Persyaratan administrasi, diukur dari:

- Macam-macam persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima P2KP apakah memberatkan
- Tingkat pemahaman penerima proyek terhadap persyaratan administrasi proyek
- Tingkat kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi proyek
- Tingkat kesungguhan dalam memenuhi persyaratan administrasi proyek

3. Kemampuan organisasi pelaksana (X2), indikatornya:
- a. Kemampuan menyampaikan informasi, diukur dari:
    - Tingkat kemampuan pelaksana proyek dalam memberikan informasi proyek
    - Tingkat intensitas pelaksana proyek dalam memberikan informasi proyek
  - b. Kemampuan menggerakkan partisipasi anggota kelompok, diukur dari:
    - Tingkat kemampuan pelaksana proyek dalam menggerakkan partisipasi kelompok
  - c. Komitmen yang tinggi terhadap tujuan kelompok, diukur dari:
    - Tingkat komitmen anggota BKM dalam memajukan tujuan kelompok
    - Tingkat kepedulian anggota BKM dalam ikut serta memecahkan masalah kelompok miskin
  - d. Dukungan financial yang memadai dan insentif yang layak, diukur dari:
    - Tingkat dukungan financial pelaksana kebijakan dalam menjalankan proyek
    - Tingkat besarnya insentif yang diterima pelaksana proyek dalam menjalankan proyek
  - e. Dukungan fasilitas-fasilitas yang memadai, diukur dari:

- Tingkat dukungan fasilitas sarana dan prasarana pelaksana proyek dalam menjalankan proyek
4. Sarana penyaluran aspirasi (X3), indikatornya:
- a. Sarana penyaluran aspirasi, diukur dari:
    - Tingkat pengetahuan penerima P2KP terhadap bentuk-bentuk sarana penyaluran aspirasi
    - Tingkat motivasi masyarakat miskin penerima proyek dalam memanfaatkan sarana penyalur aspirasi
  - b. Tingkat efektifitas sarana penyalur aspirasi bagi masyarakat miskin, diukur dari:
    - Tingkat efektifitas sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat miskin
  - c. Tingkat dominasi terhadap sarana penyaluran aspirasi, diukur dari:
    - Tingkat dominasi tokoh masyarakat dalam sarana penyaluran aspirasi sebagai tempat penyaluran aspirasi
5. Proses pengambilan keputusan (X4), indikatornya:
- a. Identifikasi dan perumusan permasalahan, diukur dari:
    - Tingkat intensitas pertemuan untuk mengungkap permasalahan masyarakat miskin
    - Tingkat kehadiran masyarakat miskin dalam pertemuan
  - b. Penentuan prioritas masalah yang perlu ditangani, diukur dari:

- Tingkat pemilihan masalah yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota kelompok
  - Tingkat konsistensi masalah yang dipecahkan konsisten diputuskan di Forum BKM
- c. Penyajian alternatif-alternatif pemecahan masalah, diukur dari:
- Tingkat keragaman alternatif masalah yang muncul dalam pertemuan
- d. Pengambilan keputusan, diukur dari:
- Tingkat intensitas usulan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan
  - Tingkat penguasaan pimpinan dalam pengambilan keputusan
6. Hasil proyek (X5), indikatornya:
- a. Hasil yang ditimbulkan secara fisik, diukur dari:
- Tingkat meningkatnya sarana fisik dilokasi masyarakat miskin
  - Tingkat berkurangnya permasalahan fasilitas dilokasi masyarakat miskin
- b. Hasil yang ditimbulkan secara sosial, diukur dari:
- Tingkat meningkatnya sarana sosial masyarakat miskin
  - Tingkat aktualisasi masyarakat miskin dalam kehidupan sosial meningkat
- c. Hasil yang ditimbulkan secara ekonomi, diukur dari:
- Tingkat peningkatan usaha masyarakat miskin

- Tingkat peningkatan penghasilan masyarakat miskin

7. Kebutuhan kelompok sasaran (X6), indikatornya:

- a. Terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran secara fisik, diukur dari:
  - Tingkat terpenuhinya kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana
  - Tingkat kemanfaatan prasarana fisik bagi masyarakat miskin
- b. Terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan, diukur dari:
  - Tingkat kemudahan masyarakat miskin terhadap akses ekonomi
  - Tingkat kemudahan masyarakat miskin dalam mendapatkan pekerjaan
- c. Terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran untuk berpartisipasi dalam implementasi proyek, diukur dari:
  - Tingkat sarana tempat partisipasi masyarakat miskin meningkat
  - Tingkat peningkatan pengembangan diri masyarakat miskin

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis dan sumber datanya berasal dari, antara lain :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Diperoleh dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam questioner.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku, data monografi dan lain-lain sumber data sekunder.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah menggunakan questioner sebuah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, dimana questioner berisi jawaban-jawaban didasarkan pada skala pengukuran yang kuantitatif.

Mengenai skala pengukuran ini menurut Sugiyono (1994 :70), ada 4 jenis skala pengukuran variabel, yaitu :

1. pengukuran nominal atau Skala penggolongan
2. Skala pengukuran ordinal (penggolongan dan urutan)
3. Skala pengukuran interval (penggolongan, urutan dan jarak)
4. Skala pengukuran ratio (penggolongan, urutan jarak dan ratio)

Berdasarkan jenis ukuran yang telah dikelompokkan tersebut, maka skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ukuran ordinal, yaitu dengan mengurutkan responden tersebut menurut tingkatannya.

Tingkatan tersebut dilakukan dengan menyusun skala dan gambaran mengenai bentuk penilaian dengan menggunakan skala ordinal bentuk tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kategori mendukung dengan skor 4.
- b. Kategori cukup mendukung dengan skor 3.
- c. Kategori kurang mendukung dengan skor 2.
- d. Kategori tidak mendukung dengan skor 1.



## **G. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

### **G. 1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unit yang akan kita teliti, dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh KK yang menerima bantuan P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, Kota Semarang.

### **G. 2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Terdiri dari:

#### **1. Sampling frame**

Adalah daftar semua unsur-unsur sampling dalam populasi (Singarimbun, 1982:2). Sampling frame dalam penelitian ini adalah penerima bantuan P2KP yang masuk dalam kegiatan pinjaman ekonomi produktif PJM I berjumlah 124 warga/kk.

#### **2. Sampling fraction**

Merupakan pecahan dari daftar kerangka sampling yang mewakili jumlah populasi yang menentukan berapa besarnya sampel yang di ambil. Dalam sampel fraction ini peneliti akan mengambil beberapa elemen sampel, untuk selanjutnya mengambil besarnya Persentase dari setiap jumlah elemen sampel yang dipilih tersebut. Alasan yang mendasari pemilihan sampel seperti yang tersebut dalam sampel size adalah lokasi RW I dan III jumlah penerimanya lebih banyak bila dibandingkan dengan RW VIII dan IX, sedangkan untuk RW X adalah wilayah yang mendapat proyek untuk semua

bidang proyek yaitu fisik, sosial dan ekonomi produktif. Gambaran mengenai sampling frame dapat dilihat pada tabel III. 1 dibawah ini.

Tabel III. 1  
SAMPLING FRAME  
PENERIMA P2KP DI KELURAHAN TLOGOMULYO

No.	Lokasi	Pihak Penerima
1.	RW I	26
2.	RW III	33
3.	RW VIII	11
5.	RW IX	23
6.	RW X	31
Jumlah		124

### 3. Sampling size

Yaitu besarnya sampel yang akan diteliti. Setelah melakukan penyajian sampling frame dan sampling fraction di atas maka dilakukan penghitungan besarnya sampel penelitian yang pada nantinya menjadi responden penelitian.

Dalam penelitian ini sampling size adalah mengalikan jumlah penerima proyek di RW yang telah ditentukan dikalikan 40% sehingga berdasarkan hal di atas tersebut diketahui jumlah sampelnya yang di ambil sebanyak 35 penerima proyek sebagai responden dalam penelitian ini.

Alasan yang mendasari penentuan besarnya jumlah sampel adalah mengacu pada pendapat Ida Bagus Mantra dan Kasto (Singarimbun dan Effendi, 1989: 171) bahwa sampel yang tergolong sampel besar yang distribusinya normal adalah sampel yang jumlahnya, >30.

Gambaran mengenai sampling size dapat dilihat pada tabel

III. 2 dibawah ini:

Tabel III. 2  
SAMPLING SIZE  
PENERIMA P2KP

No.	Lokasi	Kelompok penerima x 40%	Hasil Penghitungan
1.	RW I	26	10, 4 menjadi 10
2.	RW VIII	33	13, 2 menjadi 13
3.	RW IX	31	12, 4 menjadi 12
	Jumlah	90	35

### G. 3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pertama yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian mengacu pada pendapat **M. Subana dan Sudrajat S (2001: 126-127)** adalah teknik sampel purfosisif yaitu pengambilan sampel yang ditekankan pada pertimbangan karakteristik tertentu dari subjek penelitiannya. Dasar yang dijadikan pertimbangan pengambilan sampel purfosisif adalah faktor lokasi dan banyaknya penerima proyek diwilayah tersebut. Teknik pengambilan sampel tersebut adalah ketika peneliti mengambil beberapa elemen sampel dari sampling fraction.

Kemudian teknik pengambilan sampel yang kedua adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proposional random sampling, adalah pengambilan sampel secara acak dengan didasarkan pada perimbangan tertentu. Teknik sampling ini digunakan pada saat peneliti mengambil besarnya persentase dari elemen yang telah ditentukan bersarkan karakteristik

tertentu, yaitu menghitung besarnya Persentase yang diambil dari tiap elemen sampel yang telah dipilih tersebut dengan mengalikanya 40 %.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Ditinjau dari pengumpulannya, data dapat diperoleh dengan cara :

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang sangat berkaitan dengan hipotesis yang dipilih untuk dijawab para responden kemudian diserahkan kembali kepada peneliti. Questioner ini diberikan kepada masyarakat miskin penerima proyek berdasarkan sampel penelitian yang sudah ditentukan dalam proposal penelitian tesis ini sebanyak 35 responden.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara/tanya jawab secara langsung dengan responden. Teknik wawancara ini digunakan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai implementasi P2KP II di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang guna pembuatan proposal penelitian dimana wawancara tersebut dilakukan kepada Fasilitator Proyek, anggota BKM dan warga penerima proyek.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai pengamat, untuk melihat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

4. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang relevan bagi penelitian.

## **I. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut perlu diolah, dianalisis dan diuji kebenarannya dengan menggunakan rumus-rumus statistik terhadap hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

### **I.1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap pengolahan data meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Editing**

Adalah meneliti kembali data yang diperoleh dari lapangan, kalau mungkin ada kekeliruan segera dibetulkan. Jawaban yang masih kosong segera diisi, bila perlu kembali ke lapangan.

#### **2. Koding**

Yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Biasanya klasifikasi ini dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan kode-kode tertentu untuk memudahkan melakukan tabulasi.

#### **3. Tabulating**

Adalah penyusunan ke dalam bentuk tabel. Melalui tabulasi, data yang diperoleh dari lapangan akan tampak ringkas dan bersifat

merangkum. Dalam tahap ini dapat dikatakan bahwa data telah selesai diproses.

## I. 2. Teknik Analisis Data

Secara garis besar, analisis data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

### 1. Analisis Kuantitatif

Analisa kuantitatif ini adalah analisa yang diperuntukan bagi data besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.

### 2. Analisis Kualitatif

Yaitu analisa yang digunakan untuk data yang diperoleh melalui wawancara yang datanya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Kedua analisa tersebut tidak dapat dipisahkan karena tidak semua data dapat dijabarkan secara konsep saja tetapi juga dihitung dengan angka-angka sehingga memungkinkan hasil penelitian yang akurat. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh **Koentjoroningrat (1991: 308)**, bahwa dalam usaha untuk memperoleh pengukuran yang tepat, masalah yang pokok dalam ilmu sosial adalah bagaimana menguantitatifkan data kualitatif.

Dalam penelitian ini analisis datanya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

## J. Teknik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesa ini pada dasarnya dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah:

### a. Koefisien Korelasi Rank Kendall

Koefisien ini digunakan untuk menguji hipotesis minor, yaitu tingkat asosiasi atau hubungan antara variabel  $X_1$  dengan  $Y$  atau  $X_2$  dengan  $Y$  dan  $X_3$  dengan  $Y$ , adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$$

Dimana:

$\tau$  = Koefisien korelasi Rank Kendall

$S$  = Skor

$N$  = Jumlah responden

Apabila terdapat ranking yang sama atau kembar pada observasi skor variabel  $X$  dan  $Y$ , akan berakibat mengubah pembagi pada rumus di atas sehingga rumus Rank Kendall menjadi:

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_y}}$$

Dimana:

$\tau$  = Koefisien korelasi Rank Kendall

$S$  = Skor

$N$  = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

$T_x = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$ , t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel X

$T_y = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$ , t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel Y

Karena N lebih besar dari 10 angka, dapat dianggap berdistribusi normal oleh sebab itu dalam pengujian signifikansinya harga koefisien korelasi rank Kendall di atas terlebih dahulu didistribusikan ke dalam rumus berdistribusi berikut:

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila  $Z_0 > Z_t$  pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila  $Z_0 > Z_t$  pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila  $Z_0 < Z_t$  pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.



b. Chi-Square Goodness-Of-Fit Test

Menurut Imam Ghozali (2002: 22-24), uji *Goodness-Of-Fit* digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian (*correspondence*) antara *observed* dan *expected observation* dalam setiap kategori. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Dimana:

$O_i$  : Jumlah *oserved cases* dalam ith kategori

$E_i$  : Jumlah *expected cases* dalam ith kategori ketika  $H_0$  benar

$K$  : Jumlah kategori

Jika kesesuaian antara *observed* dan *expected* frekuensi dekat, maka perbedaan antara  $(O_i - E_i)$  akan kecil dan konsekuensinya  $x^2$  akan kecil. Namun demikian jika perbedaannya besar nilai  $x^2$ , maka semakin kecil probabilitas bahwa observasi frekuensi berasal dari populasi dimana  $H_0$  dan *expected* frekuensi didasarkan. Walaupun persamaan (2.3) berguna untuk memahami  $x^2$ , tetapi memerlukan perhitungan yang banyak rumus yang lebih sederhana untuk merubah  $x^2$  sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^K \frac{O_i^2}{E_i} - N$$

$N$  adalah jumlah observasi. Sampling distribution  $x^2$  pada  $H_0$  seperti dihitung pada rumus pertama mengikuti distribusi *Chi-Square* dengan *degree*

of freedom (df) = k-1. Appendix tabel C berisi sampling distribution *Chi-Square* dengan probabilitas yang berkaitan dengan nilai tertentu. Pada setiap atas kolom tabel C berisi probabilitas *occurrence* dari nilai *Chi Square* jika H0 benar. Nilai dalam kolom adalah nilai *Chi-Square*.

c. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  dengan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan ranking masing-masing variabel yang di asosiasikan secara bersama-sama.

Untuk menghitung harga W adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12} k^2 (N^3 - N) - k \sum T}$$

Dimana:

$$T = \frac{\sum (t^3 - t)}{12}$$

Keterangan:

- W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall
- S = Hasil Observasi ranking tiap variabel
- k = Banyaknya himpunan ranking perjenjang
- N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking
- T = Jumlah harga-harga T untuk semua ranking

t = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

Untuk signifikansinya dipergunakan rumus:

$$X^2 = k (N-1) W$$

Dimana:

$$X^2 = \text{test chi square}$$

k = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga kritis chi kuadrat dengan rumus  $df = N-1$  adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Apabila  $X_0^2 > X_1^2$  pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila  $X_0^2 > X_1^2$  pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila  $X_0^2 < X_1^2$  pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. 1. Keadaan Geografis**

Kelurahan Tlogomulyo merupakan salah satu dari 17 kelurahan di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 203, 301 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu tanah sawah dan tanah kering serta lain-lain (sungai, jalan dan kuburan). Tanah Sawah merupakan tanah tadah hujan dengan luas 8 Ha, sedangkan tanah kering luasnya 195, 313 Ha terdiri 4 bagian tanah kering yaitu pekarangan/bangunan luasnya 108 Ha, ladang gembala luasnya 87, 313 Ha, dan taman luasnya 1 Ha, serta lain-lain (sungai, jalan dan kuburan) luasnya 4 Ha.

Kemudian Kelurahan Tlogomulyo memiliki beberapa sarana meliputi sarana pemerintahan desa yang berupa 1 buah balai desa, sarana jalan berupa jalan kelas V panjangnya 3, 5 km kondisinya rusak sepanjang 1 Km, jembatan kodya panjangnya 4 buah dan jemabatan desa 4 buah dan satu buah kantor desadari Lahan sawah seluas 1333,59 ha yang terdiri dari 282,93 sawah dengan irigasi teknis, 425, 2585 ha sawah dengan irigari setengah teknis, 593,76 irigasi sederhana, dan 31,635 ha merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan tanah kering seluas 982,35 ha dengan rincian 792,05 ha untuk pekarangan atau bangunan, 190,3 ha untuk tegal atau kebun.

## A. 2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Tlogomulyo Bulan Agustus Tahun 2004, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tlogomulyo 9376 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4696 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah sebanyak 4680 jiwa dengan 2161 KK. Sebaran penduduk Kelurahan Tlogomulyo menurut kelompok umur sebagai berikut:

Tabel IV. 1  
SEBARAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	571	538	1109
5-9	464	474	938
10-14	440	464	904
15-19	438	420	858
20-24	470	483	953
25-29	562	626	1188
30-34	490	596	1086
35-39	477	396	873
40-44	316	223	539
45-49	193	166	359
50-54	99	97	196
55-59	61	65	126
60-64	53	62	115
< 65	62	70	132
	4696	4680	9376

Sumber : Data monografi Kelurahan Tlogomulyo, Agustus 2004

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berusia antara 25-29 tahun yaitu berjumlah 1188 (12, 67%) jiwa, kemudian penduduk dengan jumlah terkecil berusia 60-64 tahun berjumlah 115 (1, 23 %) jiwa. Jadi dengan demikian bahwa mayoritas penduduk Tlogomulyo berada pada masa usia produktif.

### A. 3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

#### 1. Tingkat pendidikan

Meningkatkan kecerdasan bangsa adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara berfikir pada seseorang yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Tlogomulyo dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel IV. 2  
SEBARAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	1777	18, 95
2	Tidak tamat SD	1115	11, 89
3	Tamat SD	1911	20, 38
4	Tamat SLTP	1903	20, 20
5	Tamat SLTA	1182	12, 61
6	Tamat Diploma	1205	12, 85
7	Tamat Sarjana	1114	11, 88
8	Buta Huruf	203	2, 16
	Jumlah	9376	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tlogomulyo,  
Agustus 2004

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penduduk menurut pendidikan mayoritas berpendidikan tamat SD sebanyak 1205 orang (20, 38 %) diikuti tamat SLTP sebanyak 1903 orang (20, 20 %), tidak sekolah sebanyak 1777 (18, 95 %) orang, tamat SLTA sebanyak 1182 (12, 61 %) orang, tidak tamat SD sebanyak 1115 (11, 89 %) orang dan penduduk tamat sarjana sebanyak 1114 (0, 83 %) orang, dan penduduk tamat sarjana sebanyak 312 (0, 92 %) orang, dan buta huruf 735 (2, 16%) orang.

## 2. Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Tlogomulyo dilihat dari sisi mata pencaharian bermacam-macam, untuk mengetahui lebih jelasnya tabel di bawah ini memperlihatkan sebaran penduduk Kelurahan Tlogomulyo berdasarkan mata pencaharian, adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 3  
SEBARAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase
1	Petani	748	11, 18
2	Buruh tani	60	0, 86
3	Pengusaha	20	0, 29
4	Buruh industri	108	1, 54
5	Buruh bangunan	812	11, 58
6	Pedagang	146	2, 08
7	Pengangkutan	36	0, 51
8	Pegawai Negeri (Sipil dan ABRI)	246	3, 51
9	Pensiunan	38	0, 54
10	Lain-lain (Jasa)	4799	68, 43
Jumlah		7013	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tlogomulyo,  
Agustus 2004

Dari tabel IV. 3 dapat diketahui komposisi penduduk Kelurahan Tlogomulyo dilihat dari mata pencahariannya mayoritas lain-lain (jasa) yaitu sebesar 4799 orang (68, 43 %), diikuti oleh buruh bangunan sebanyak 812 orang (11, 58 %), petani sebanyak 748 orang (11, 18 %), pegawai negeri (sipil dan ABRI) sebanyak 246 (3, 51 %), pedagang sebanyak 146 (2, 08 %), buruh industri sebanyak 108 orang (1, 54 %), buruh tani sebanyak 60 (0, 86 %), pensiunan sebanyak 38 orang (0, 54 %),

dan pengangkutan sebanyak 36 orang (0, 51 %) orang serta yang tekecil adalah pengusaha sebanyak 20 orang (0, 29 %).

### 3. Keagamaan

Kemudian dilihat dari sisi kehidupan keagamaan, penduduk Kelurahan Tlogomulyo menganut bermacam-macam agama dan dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik terbuka yang dapat merusak kehidupan beragama. Mereka sadar bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk memperjelas sebaran penduduk menurut agama di Kelurahan Tlogomulyo, tabel dibawah ini menunjukkan sebaran penduduk menurut agama dan kepercayaan adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4  
SEBARAN PENDUDUK  
MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN

No	Agama dan kepercayaan	Frekuensi	Persentase
1	Islam	8375	89, 32
2	Kristen	451	4, 81
3	Katolik	508	5, 42
4	Hindu	20	0, 21
5	Budha	22	0, 23
6	Lain-lain	-	-
	Jumlah	9376	100%

Sumber : Data monografi Kelurahan Tlogomulyo, Agustus 2004

Dari tabel IV. 4 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk Tlogomulyo menurut agama dan kepercayaan yang dianut, mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah penduduk 8375 (89, 32%) jiwa kemudian secara berurutan penganut agama Katholik dengan 508 (5, 42%)



jiwa, penduduk beragama Kristen 451 (4, 81%) jiwa, kemudian beragama Budha dengan jumlah penduduk 22 (0, 23 %) jiwa dan beragama Hindu dengan jumlah penduduk 20 (0, 21 %) jiwa.

#### 4. Sarana Pendidikan

Untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun diperlukan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini sarana pendidikan minimal dapat menampung kebutuhan penduduk untuk menuntut pendidikan. Untuk lebih jelasnya tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Tlogomulyo sebagai berikut:

Tabel IV. 5  
SARANA PENDIDIKAN  
DI KELURAHAN TLOGOMULYO

No	Sarana pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	TK	4	57, 14%
2	SD Negeri	2	28, 57%
3	SLTP Negeri	1	14, 29%
	Jumlah	7	100

Sumber : Data monografi Kelurahan Tlogomulyo, Agustus 2004

Berdasarkan tabel IV.5 Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Tlogomulyo yang mempunyai persentase terbesar adalah TK 57, 14 %, kemudian menyusul SD Negeri 28, 57% dan SLTP Negeri 14, 29%. secara keseluruhan adalah 53 dengan rincian Taman Kanak-Kanak.

## B. HASIL PENELITIAN

### B. 1. Identitas Responden

Data identitas responden disajikan untuk mengetahui keterangan yang ada pada objek penelitian. Identitas responden dilakukan dengan membagi responden kedalam kategori usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lokasi berjualan dan jenis dagangan. Secara lebih jelas, identitas responden dapat dilihat dalam tabel-tabel yang ada di bawah ini :

Tabel IV. 6  
USIA RESPONDEN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
21-30	5	14
31-40	12	30
41-50	11	36
51 keatas	7	20
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV. 6 dapat dilihat bahwa dari 35 responden mayoritas responden (36 %) berusia antara 41-50 tahun, sedangkan responden dengan persentase terkecil (14 %) berusia antara 21-30 tahun. Kemudian lainnya berusia 31- 40 tahun (30 %) dan berusia 51 tahun keatas (20 %). Menyangkut identitas responden mayoritas berada pada usia menuju taraf kematangan dalam bekerja dan lainnya menunjukkan bahwa usia mereka berada pada masa puncak usia produktif dalam bekerja.

Tabel IV.7  
JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	24	58
Perempuan	11	42
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV. 7 dapat dilihat bahwa dari 35 responden mayoritas responden 24 (58 %) berdasarkan jenis kelaminnya, berjenis kelamin laki-laki, sedangkan lanaya 11 (42 %) berjenis kelamin perempuan.

Tabel IV. 8  
PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak Tamat SD	5	28, 57
Tamat SD	15	42, 86
Tamat SMP	6	17, 14
Tamat SMA	7	20
Tamat Perguruan Tinggi	2	5, 71
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Pada tabel IV. 8 dapat dilihat bahwa dari segi pendidikan sebanyak 35 responden sebagian besar responden berpendidikan tamat SD 42 %, sedangkan penduduk dari segi pendidikanya yang menempati Persentase terkecil yaitu tamat perguruan tinggi 5, 71 %. Jadi dengan demikian responden dilihat dari segi pendidikan taraf pengetahuannya masih kurang dan ini tentunya akan berpengaruh pada implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, dimana dengan kata lain ada peluang terjadinya hambatan dalam implementasi P2KP tersebut.

Tabel IV. 9  
JENIS USAHA RESPONDEN

Jenis Dagangan	Frekuensi	Persentase
Kelontong	6	17, 14
Warung makan	11	31, 43
Toko	9	25, 71
Catering	5	14, 29
lainya	4	11, 43
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Tabel IV. 9 menunjukan responden dilihat dari jenis usahanya dari 35 responden mayoritas responden 31, 43 % jenis usahanya warung makan, sedangkan yang terkecil 11, 43 % lainnya. Kemudian lainnya toko 25, 71 %, kelontong 17, 14 %, dan catering 14, 29 %.

Jadi dengan demikian bahwa dalam implementasi P2KP bahwa pinjaman ekonomi produktif yang merupakan kegiatan bidang ekonomi, usaha warung makan berkembang positif di Kelurahan tersebut dan ini peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

## B. 2. Daya kerja implementasi (Y)

Daya kerja implementasi proyek adalah kemampuan proyek dalam melakukan implementasi proyek untuk mencapai tujuan-tujuan dari proyek secara maksimal.

Disini akan disajikan data dari masing-masing indikator daya kerja yang berupa pengisian kuersioner. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV. 10  
KEMAMPUAN BKM MEMBERIKAN  
KEGIATAN FISIK KEPADA MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mampu	3	8,6
Cukup mampu	9	25,7
Kurang mampu	16	45,7
Tidak mampu	7	20
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.6

Dari tabel IV. 10 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur dari kemampuan P2KP menciptakan KBM yang mampu memberikan kegiatan fisik yang layak bagi masyarakat bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 45,7 % menjawab kurang mampu.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mampu adalah kegiatan fisik proyek P2KP hanya mampu mengurangi sedikit saja tempat-tempat yang membutuhkan perbaikan sarana fisik yaitu perbaikan fisik di RW IX, X dan V. Padahal di Kelurahan Tlogomulyo terdapat wilayah yang membutuhkan perbaikan sarana fisik ataupun pembangunan sarana fisik.

Tabel IV. 11  
KEMAMPUAN BKM MEMBERIKAN  
KEGIATAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mampu	3	8,6
Cukup mampu	2	5,7
Kurang mampu	30	85,7
Tidak mampu	-	
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.7

Dari tabel IV. 11 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur P2KP dalam menciptakan BKM yang mampu memberikan kegiatan sosial yang layak bagi masyarakat bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 85,7 % menjawab kurang mampu.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mampu adalah adanya alokasi dana P2KP untuk kegiatan sosial menyebabkan BKM hanya mampu menyelenggarakan satu kali kegiatan sosial yaitu Bazar bagi masyarakat miskin yang berupa pembelian kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang sangat murah.

Tabel IV.12  
KEMAMPUAN BKM  
MEMBERIKAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak mampu	2	5,7
Kurang mampu	10	28,6
Cukup mampu	19	54,3
mampu	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.8

Dari tabel IV. 12 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur P2KP dalam menciptakan KBM yang mampu memberikan kegiatan bantuan kredit mikro

yang layak bagi masyarakat bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang mampu.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mampu adalah bahwa di Kelurahan Tlogomulyo banyak sekali masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan kredit dan kegiatan kredit mikro yang selama ini terjadi hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan menunggu giliran jika masa bergulirnya dana telah kembali.

Tabel IV. 13  
KEEFEKTIFAN P2KP  
DI LOKASI SASARAN MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Efektif	2	5,8
Cukup efektif	11	31,4
Kurang efektif	17	48,6
Tidak efektif	5	14,2
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.9

Dari tabel IV. 13 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keefektifan P2KP dalam pelaksanaan dilokasi sasaran masyarakat miskin bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang efektif.

Alasan sebagian besar responden atas jawaban kurang efektif adalah kegiatan fisik P2KP di Kelurahan Tlogomulyo dilaksanakan bukan dilokasi sasaran masyarakat miskin hal ini terjadi karena kegiatan fisik tersebut menggunakan sistem bergulir dimana karena wilayah yang merupakan kantong masyarakat miskin merasa takut tidak mampu membayar angsuran sehingga

kegiatan fisik dilakukan didaerah perumahan yang sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat mampu.

Tabel IV. 14  
KEEFEKTIFAN P2KP MENGURANGI  
BEBAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Efektif	3	8,6
Cukup efektif	12	34,3
Kurang efektif	17	48,6
Tidak efektif	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.10

Dari tabel IV. 14 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keefektifan P2KP dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang efektif.

Alasan sebagian besar responden atas jawaban kurang efektif adalah dana yang tersedia dalam proyek masih minim dengan persentase masyarakat yang membutuhkan lebih besar. Kemudian dana yang telah disalurkan sebagian masyarakat miskin tersebut hanya sedikit mengurangi beban masyarakat miskin hal ini terjadi karena jumlah pinjamanya hanya sedikit rata-rata Rp. 500. 000 sehingga jenis usaha yang dilakukan kecil-kecilan.

Tabel IV. 15  
KEEFEKTIFAN P2KP MENGURANGI  
SARANA DAN PRSARANA MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Efektif	1	2,9
Cukup efektif	10	38,6
Kurang efektif	20	57,1
Tidak efektif	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.11



Dari tabel IV. 15 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keefektifan P2KP dalam mengurangi permasalahan sarana dan prasarana masyarakat miskin bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 57, 1 % menjawab kurang efektif.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang efektif adalah bahwa beberapa kegiatan fisik P2KP tidak dilokasi sasar masyarakat miskin karena P2KP yang dilaksanakan dengan sistem bergulir melalui angsuran sehingga masyarakat yang mampu mengangsur yang mendapat bantuan perbaikan/ pembangunan sarana fisik sehingga proyek fisik yang dilaksanakan hanya mampu sedikit mengurangi permasalahan fisik masyarakat miskin.

Tabel IV. 16  
KEEFEKTIFAN P2KP MENGURANGI  
KESULITAN EKONOMI PENERIMA PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Efektif	3	8, 6
Cukup efektif	10	28, 6
Kurang efektif	19	54, 3
Tidak efektif	3	8, 6
Jumlah	35.	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 12

Dari tabel IV. 16 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keefektifan P2KP dalam mengurangi kesulitan ekonomi penerima proyek bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54, 3 % menjawab kurang efektif.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang efektif adalah karena pinjaman P2KP nilai nominalnya sedikit maka bantuan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya sedikit mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat miskin.

Tabel IV. 17  
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Positif.	2	5,7
Cukup positif	13	37,1
Kurang positif	17	48,6
Tidak positif	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 13

Dari tabel IV. 17 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat persepsi masyarakat miskin terhadap P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang positif.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang positif adalah bahwa karena P2KP menggunakan sistem bergulir sehingga karena kemampuan untuk mengangsur rendah mereka beranggapan bahwa proyek tersebut setidaknya hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu mengangsur.

Tabel IV. 18  
KESADARAN PENERIMA PROYEK  
TERHADAP P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	2,9
Cukup tinggi	12	34,3
Kurang tinggi	17	48,6
Tidak tinggi	5	14,3
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.14

Dari tabel IV. 18 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kesadaran penerima proyek terhadap proyek bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah bahwa akibat dari ketidakmampuannya atas aturan proyek yang menggunakan sistem bergulir dalam kegiatan fisik kurang berani mengatakan mau menerima tanggungjawab tersebut karena takut menunggak. Kemudian untuk kegiatan ekonomi mereka mau meminjam tetapi bila tidak mampu mengangsur jangan disalahkan, karena masyarakat miskin dalam persepsinya pasti dibantu jika tidak kuat membayar dianggap wajar.

Tabel IV. 19  
MOTIVASI PENERIMA PROYEK  
BERPARTISIPASI DALAM IMPLEMENTASI P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	2,9
Cukup tinggi	11	31,4
Kurang tinggi	19	54,3
Tidak tinggi	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 15

Dari tabel IV. 19 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kesadaran penerima proyek terhadap P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah jika kegiatan fisik dilaksanakan diwilayahnya mereka mau secara aktif berpartisipasi jika tidak ya tidak mau ikut berpartisipasi. Kemudian mereka mau meminjam akan tetapi jika kesulitan membayar jangan disalahkan.

Tabel IV. 20  
KEMAMPUAN ORGANISASI PELAKSANA DALAM  
MEMBERIKAN KEYAKINAN KEPADA MASYARAKAT  
BAHWA PROYEK TIDAK HIBAH

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mampu	1	2,9
Cukup mampu	11	31,4
Kurang mampu	18	51,4
Tidak mampu	5	14,3
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 16

Dari tabel IV. 20 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur organisasi proyek dalam memberikan keyakinan kepada penerima proyek bahwa proyek tidak hibah bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 51,4 % menjawab kurang mampu.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mampu adalah masyarakat miskin menganggap bantuan proyek tersebut untuk mereka sehingga yang terpenting mereka menerima dulu permasalahan ada kesulitan itu urusan nanti.

Tabel IV. 21  
KEBERHASILAN PROYEK  
MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Berhasil	-	-
Cukup berhasil	13	37,1
Kurang berhasil	19	54,3
Tidak berhasil	3	5,7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.17

Dari tabel IV. 21 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keberhasilan proyek dalam menggerakkan partisipasi masyarakat penerima proyek bahwa

dari 35 responden, sebagian besar responden 54, 3 % menjawab kurang berhasil.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang berhasil mereka mau berpartisipasi dalam proyek jika dilaksanakan dilokasinya tetapi bila tidak dilaksanakan dilokasinya mereka tidak mau ikut terlibat karena mereka beranggapan wilayahnya berbeda-beda.

Tabel IV. 22  
KEBERHASILAN PROYEK  
MENAMBAH KESADARAN PENERIMA PROYEK  
MENGENAI KEMAMPUAN MEREKA SENDIRI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Berhasil	2	5, 7
Cukup berhasil	10	28, 8
Kurang berhasil	21	60
Tidak berhasil	2	5, 7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.18

Dari tabel IV. 22 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur keberhasilan proyek dalam menambah kesadaran dari penerima proyek mengenai kemampuannya sendiri bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 60 % menjawab kurang berhasil.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab para anggota BKM sering memberikan penjelasan mengenai pentingnya sikap untuk maju, akan tetapi mereka beranggapan masalah miskin tersebut biasanya karena faktor nasib.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel daya kerja maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus di atas maka didapat  $i = 33-27/4 = 6/4 = 1,5$ , jadi maka  $i = 1,5$ . Pengelompokan skor tabel untuk variabel daya kerja implementasi adalah sebagai berikut :

Tabel. IV. 23  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
DAYA KERJA IMPLEMENTASI PROYEK

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	31, 53-33, 03
Cukup tinggi	CT	30, 02-31, 52
Kurang tinggi	KT	28, 51-30, 01
Rendah	R	27-28, 50

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel daya kerja implementasi, yaitu:

Tabel IV. 24  
REKAPITULASI PENILAIAN  
DAYA KERJA IMPLEMENTASI PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	5	14,5
Cukup tinggi	7	20,3
Kurang tinggi	17	49,3
Rendah	6	17,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 06-18

Dari tabel IV. 24 rekapitulasi penilaian daya kerja implementasi proyek di atas, dapat diketahui bahwa nilai skor sebagian besar 66, 7 % adalah rendah (lihat lampiran). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo rendah dalam implementasinya.

### C. 3. Persyaratan Proyek (X1)

Persyaratan proyek (X1) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi yang menjadi syarat dalam pelaksanaan suatu proyek. Berikut ini hasil dari setiap jawaban responden terhadap kuesioner, yaitu:

Tabel IV. 25  
PERSYARATAN TEKNIS MEMBERATKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memberatkan	2	5, 7
Cukup memberatkan	16	47, 6
Sedikit memberatkan	15	42, 9
Tidak memberatkan	2	5, 7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 19

Dari tabel IV. 25 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh penerima proyek memberatkan bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 47, 6 % menjawab cukup memberatkan.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup memberatkan persyaratan yang teknis yang harus dipenuhi untuk dapat mendapat bantuan kredit P2KP adalah mau menabung dan menunjukkan bukti telah menabung, telah disurvei dan menunjukkan surat bukti masyarakat miskin serta mempunyai usaha atau sedang merintis usaha. Terkadang jika para calon

penerima P2KP yang belum disurvei harus mencari anggota BKM untuk menysurveynya dan memberikan surat kelayakan dapat pinjaman dari P2KP.

Tabel IV. 26  
MENGERTINYA PENERIMA PROYEK TERHADAP  
PERSYARATANTEKNIS

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengerti	5	14, 3
Cukup mengerti	13	37, 1
Kurang mengerti	14	40
Tidak mengerti	5	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 20

Dari tabel IV. 26 dapat dijelaskan dilihat dari mengertinya penerima proyek terhadap persyaratan teknis bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 40 % menjawab kurang mengerti.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mengerti adalah kenapa harus disurvei kelayakan dan menunjukkan surat bukti masyarakat miskin harus menunjukkan bukti menabung.

Tabel IV. 27  
KEMUDAHAN PERSYARATAN TEKNIS

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mudah	1	2, 9
Cukup mudah	15	42, 9
Kurang mudah	16	45, 7
Tidak mudah	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 21

Dari tabel IV. 27 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur kemudahan persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 45, 7 % menjawab kurang mudah.



Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mudah jika mau memenuhi persyaratan teknis maka bila belum menabung harus menabung terlebih dahulu, mencari anggota BKM untuk disurvei dan mendapatkan buktinya.

Tabel IV. 28  
KESUNGGUHAN MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	5,7
Cukup tinggi	14	40
Kurang tinggi	17	48,6
Tidak tinggi	2	5,7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 22

Dari tabel IV. 28 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kesungguhan penerima proyek dalam pemenuhan persyaratan bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah sebenarnya mereka malas untuk mengurus persyaratan teknis tetapi karena ingin mendapat bantuan kredit mikro terpaksa mereka berusaha memenuhinya.

Tabel IV. 29  
PERSYARATAN ADMINISTRASI MEMBERATKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memberatkan	3	8,6
Cukup memberatkan	14	40
Sedikit memberatkan	15	42,9
Tidak memberatkan	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 23

Dari tabel IV. 29 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur persyaratan administrasi yang dipenuhi oleh penerima proyek memberatkan bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 42, 9 % menjawab sedikit memberatkan.

Alasan sebagian besar yang menjawab sedikit memberatkan adalah jika ingin mendapat bantuan pinjaman P2KP hanya membawa foto copy KTP setempat dan membentuk KSM, mengisi blangko permohonan kredit, tanda tangan perjanjian kredit dan menandatangani perjanjian tenggang renteng.

Tabel IV. 30  
MENGERTINYA TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengerti	1	2, 9
Cukup mengerti	17	48, 6
Kurang mengerti	16	45, 7
Tidak mengerti	1	2, 9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 24

Dari tabel IV. 30 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat mengertinya penerima proyek terhadap persyaratan administrasi bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab cukup mengerti.

Alasan sebagian besar yang menjawab cukup mengerti anggota BKM memberikan penjelasan-penjelasan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Tabel IV. 31  
KEMUDAHAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mudah	2	5, 7
Cukup mudah	16	45, 7
Kurang mudah	15	42, 9
Tidak mudah	2	5, 7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 25

Dari tabel IV. 31 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kemudahan penerima proyek untuk memenuhi persyaratan administrasi bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 45, 7 % menjawab cukup mudah.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup mudah adalah mereka dalam memenuhi persyaratan tersebut tidak banyak mengeluarkan biaya.

Tabel IV. 32  
KESUNGGUHAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	2, 9
Cukup tinggi	13	37, 1
Kurang tinggi	17	48, 6
Tidak tinggi	4	11, 4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 26

Dari tabel IV. 32 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kesungguhan penerima proyek dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan proyek bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab kurang tinggi.

Alasan dari sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi sebenarnya mereka merasa malas untuk membentuk KSM dan keberatan untuk menandatangani perjanjian tanggung renteng tetapi dari pada tidak mendapat bantuan kredit terpaksa melakukannya.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel persyaratan proyek maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 25-16/4 = 9/4 = 2,25$  , jadi maka  $i = 2,25$ . Pengelompokan skor tabel untuk variabel persyaratan proyek adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 33  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
PERSYARATAN PROYEK

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	22, 78-25, 03
Cukup tinggi	CT	20, 52-22, 77
Kurang tinggi	KT	18, 26-20, 51
Rendah	R	16-18, 25

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel persyaratan proyek, yaitu:

Tabel IV. 34  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
PERSYARATAN PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	8,6
Cukup tinggi	13	37,1
Kurang tinggi	12	34,3
Rendah	7	20
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 19-26

Dari tabel IV. 34 rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa variabel persyaratan proyek rendah dalam mendukung implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian sebagian besar 54, 3 % (lihat lampiran).

#### C. 4. Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2)

Kemampuan organisasi pelaksana (X2) adalah jumlah dan kualitas personil, komitmen mereka terhadap keberhasilan proyek dan dukungan sumber daya lainnya. Berikut ini penyajian data dari masing-masing pertanyaan variabel kemampuan organisasi pelaksana, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 35  
KEMAMPUAN ANGGOTA BKM  
MENYAMPAIKAN INFORMASI P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	2	5, 7
Cukup baik	11	31, 4
Kurang baik	20	57, 1
Tidak baik	2	5, 7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27

Dari tabel IV. 35 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kemampuan anggota BKM dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 57, 1 % menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang baik bahwa anggota BKM yang aktif kurang bisa menyampaikan informasi P2KP dalam

melihat siapa yang diberi informasi terkadang bahasa yang digunakan sulit untuk dimengerti.

Tabel IV. 36  
INTENSITAS ANGGOTA BKM  
MEMBERIKAN INFORMASI P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rutin	1	2, 9
Cukup rutin	9	25, 7
Kurang rutin	19	54, 3
Tidak rutin	6	17, 1
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.28

Dari tabel IV. 36 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat intensitas anggota BKM dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54, 3 % menjawab kurang rutin.

Alasan sebagian responden yang menjawab kurang rutin, para anggota BKM banyak yang tidak aktif sehingga mereka jarang memberikan informasi P2KP. Anggota BKM yang aktifpun mengingat terkadang punya kesibukan diluar tugasnya dan harus menggantikan tugas anggota BKM yang tidak aktif menyebabkan mereka jarang menyampaikan informasi P2KP.

Tabel IV. 37.  
KEMAMPUAN ANGGOTA BKM  
MENERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	1	2, 9
Cukup baik	13	37, 1
Kurang baik	19	54, 3
Tidak baik	2	5, 7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 29

Dari tabel IV. 37 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat anggota BKM dalam mengerakkan partisipasi masyarakat bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54, 3 % menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang baik adalah bahwa hanya sebagian kecil saja anggota BKM yang rajin dan pintar menggerakan partisipasi masyarakat miskin sedangkan yang sebagian besar lagi kurang bisa menggerakan partisipasi karena tidak mampu memberikan contoh dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya berperan aktif dalam pelaksanaan proyek. Sebagian besar yang tidak aktif adalah anggota BKM dari wilayah-wilayah di Tlogomulyo yang sebagian besar masyarakatnya miskin dengan tingkat pendidikanya sebagian besar kurang tinggi.

Tabel IV. 38  
KOMITMENT ANGGOTA BKM MEMAJUKAN  
TUJUAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Kuat	1	2, 9
Cukup kuat	13	37, 1
Kurang kuat	18	51, 4
Tidak kuat	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 30

Dari tabel IV. 38 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat anggota BKM memajukan tujuan kelompok masyarakat miskin dari 35 responden, sebagian besar responden 51, 4 % menjawab kurang kuat.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang kuat adalah hanya sebagian kecil saja anggota BKM yang berusaha memajukan kelompok masyarakat miskin walaupun insentifnya kecil, sedangkan yang sebagian besar

anggota BKM tingkat komitmennya rendah mereka tidak aktif sebagai anggota BKM karena menganggap P2KP dalam pelaksanaannya rumit dan tidak didukung insentif yang layak.

Tabel IV. 39  
KEPEDULIAN ANGGOTA BKM  
MEMEMECAHKAN MASALAH MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	5,7
Cukup tinggi	12	34,3
Kurang tinggi	17	48,6
Tidak tinggi	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 31

Dari tabel IV. 39 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kepedulian anggota BKM pemecahan masalah masyarakat miskin dari 35 responden, sebagian besar responden 48,6 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah banyak anggota BKM yang dipercaya masyarakat miskin menjadi anggota BKM tetapi setelah mengetahui P2KP implementasinya rumit dan kerjanya banyak menjadi kurang aktif dan peduli terhadap masalah masyarakat miskin.

Tabel IV. 40  
DUKUNGAN FINANSIAL  
ANGGOTA BKM MELAKSANAKAN P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memadai	1	2,9
Cukup memadai	12	34,3
Kurang memadai	6	45,7
Tidak memadai	6	17,1
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 32



Dari tabel IV. 40 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat dukungan finansial anggota BKM dalam melaksanakan P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 45,7 % menjawab kurang memadai.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang memadai adalah alokasi yang disediakan untuk manajemen P2KP anggota BKM hanya 5 % sudah termasuk insentifnya yang besarnya diambilkan dari alokasi dana per tahap kegiatan dalam melaksanakan P2KP.

Tabel IV. 41  
KELAYAKAN INSENTIF  
DITERIMA PELAKSANA PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Layak	4	11,4
Cukup layak	9	25,7
Kurang layak	19	54,3
Tidak layak	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 33

Dari tabel IV. 41 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kelayakan insentif yang diterima pelaksana proyek dalam pelaksanaan tugas P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang layak.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang layak bahwa pelaksana P2KP yang melaksanakan kegiatan ekonomi hanya menerima 5 % dari keuntungan kredit mikro yang bergulir padahal tugasnya berat yaitu menarik kredit dan bertanggungjawab terhadap keuangan.

Tabel IV. 42  
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA  
ANGGOTA BKM MENJALANKAN P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Menunjang	-	-
Cukup menunjang	12	34, 3
Kurang menunjang	19	54, 3
Tidak menunjang	4	11, 4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 34

Dari tabel IV. 42 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat dukungan sarana dan prasarana yang diterima anggota BKM dalam menjalankan P2KP bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 54, 3 % menjawab kurang menunjang.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang menunjang bahwa para anggota BKM hanya diberikan satu buah ruangan untuk menjalankan tugasnya itupun sumbangan dari warga yang peduli, sedangkan prasarana yang berasal dari dana alokasi P2KP hanya meja dan lemari sehingga untuk menjalankan tugasnya melaksanakan proyek tergantung pada komitmen dan kepedulian dari masing-masing anggota BKM.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel kemampuan organisasi pelaksana maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 21-16/4 = 5/4 = 1,25$ , jadi maka  $i = 1,25$ . Pengelompokan skor tabel untuk variabel kemampuan organisasi pelaksana, adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 43  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
KEMAMPUAN ORGANISASI PELAKSANA

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	19,78-21,03
Cukup tinggi	CT	18,52-19,77
Kurang tinggi	KT	17,26-18,51
Rendah	R	16-17,25

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel kemampuan organisasi pelaksana, yaitu:

Tabel IV. 44  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
KEMAMPUAN ORGANISASI PELAKSANA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	5	14,3
Cukup tinggi	10	28,6
Kurang tinggi	14	40
Rendah	6	17,1
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27-34

Dari tabel IV. 44 rekapitulasi di atas dapat dijelaskan kemampuan organisasi pelaksana P2KP masih rendah hal ini ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi penilaian yang sebagian besar dari 35 frekuensi 57,1 % rendah (lihat lampiran).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan organisasi pelaksana P2KP rendah dalam mendukung daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo.

#### C. 5. Sarana Penyaluran Aspirasi (X3)

Sarana penyaluran aspirasi (X3) adalah sarana-sarana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek yang berupa penggalian masalah dan mencari solusi bersama-sama sesuai dengan aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Berikut ini penyajian data dari hasil jawaban kuesioner variabel sarana penyaluran aspirasi, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 45  
PENGETAHUAN TERHADAP  
BENTUK-BENTUK SARANA PENYALURAN ASPIRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tahu	1	11, 4
Cukup tahu	9	60
Kurang tahu	21	25, 7
Tidak tahu	4	2, 9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 35

Dari tabel IV. 45 dapat dijelaskan dilihat dari indikator sarana yang menjadi penyalur aspirasi dalam pelaksanaan proyek bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 60 % menjawab kurang tahu.

Alasan sebagian responden yang menjawab kurang tahu adalah mereka hanya bisa menyebutkan dua sarana penyaluran aspirasi dalam implementasi P2KP yaitu Forum BKM dan Rapat Kelompok Swadaya Masyarakat. Padahal

sarana penyaluran aspirasi yang lain ada yaitu Forum Rembug Warga (RWT), Diskusi Kelompok Terarah (FGD), Pemetaan Swadaya.

Tabel IV. 46  
KEINGINAN PENERIMA PROYEK  
MEMANFAATKAN SARANA PENYALURAN ASPIRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	8,6
Cukup tinggi	10	28,6
Kurang tinggi	19	54,3
Tidak tinggi	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 36

Dari tabel IV. 46 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat keinginan penerima proyek dalam memanfaatkan sarana penyaluran aspirasi dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah mengenai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan P2KP dalam penyaluran aspirasi dipercayakan kepada anggota BKM yang berasal dari wilayahnya yang telah dipercaya untuk menjadi anggota BKM.

Tabel IV. 47  
KEEFEKTIFAN SARANA PENYALURAN ASPIRASI  
MEMENUHI KEINGINAN PENERIMA PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Efektif	1	2,9
Cukup efektif	10	28,6
Kurang efektif	20	60
Tidak efektif	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 37

Dari tabel IV. 47 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat keefektifan sarana penyaluran aspirasi dalam memenuhi keinginan masyarakat

miskin dalam memperjuangkan aspirasinya dari 35 responden, sebagian besar responden 60 % menjawab kurang efektif.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang efektif adalah bahwa sarana penyaluran aspirasi yang pernah digunakan kurang bisa memenuhi keinginan mereka karena pada saat penentuan lokasi sasaran fisik pernah terjadi perubahan lokasi sasaran di tingkat Forum BKM.

Tabel IV. 48  
PENGUASAAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP SARANA PENYALURAN ASPIRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	2,9
Cukup tinggi	8	22,9
Kurang tinggi	22	62,9
Tidak tinggi	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 38

Dari tabel IV. 48 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat penguasaan tokoh masyarakat terhadap sarana penyaluran aspirasi dari 35 responden, sebagian besar responden 62,9 % menjawab kurang tinggi.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel sarana penyaluran aspirasi maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus di atas maka didapat  $i = 11-7/4 = 4/4 = 1$ , jadi maka  $i = 1$ .

Pengelompokan skor tabel untuk variabel sarana penyaluran aspirasi adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 49  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
SARANA PENYALURAN ASPIRASI

Kategori Jawaban	Notasi	Nilai Interval
Tinggi	T	10, 03-11, 03
Cukup tinggi	CT	9, 02-10, 02
Kurang tinggi	KT	8, 01- 9, 01
Rendah	R	7-8

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel sarana penyaluran aspirasi, yaitu:

Tabel IV. 50  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
SARANA PENYALURAN ASPIRASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	8, 6
Cukup tinggi	9	25, 7
Kurang tinggi	12	34, 3
Rendah	11	31, 4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 35-38

Dari tabel IV. 50 rekapitulasi di atas mengenai sarana penyaluran aspirasi dari 35 frekuensi sebagian besar 65, 7 % (lihat lampiran) rendah. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sarana penyaluran aspirasi dalam menunjang daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo masih kurang efektif dalam memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat miskin penerima proyek.

#### C. 6. Proses Pengambilan Keputusan (X4)

Proses pengambilan keputusan (X4) adalah suatu tahapan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi P2KP untuk mencapai solusi yang efektif. Berikut ini penyajian data terhadap hasil jawaban responden tentang variabel proses pengambilan keputusan, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 51  
INTENSITAS PERTEMUAN MENGUNGKAP  
PERMASALAHAN MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	3	8,6
Cukup sering	13	37,1
Jarang	18	51,4
Tidak sama sekali	1	2,9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 39

Dari tabel IV. 51 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat intensitas pertemuan untuk mengungkap permasalahan penerima proyek dalam pelaksanaan P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 51,4 % menjawab jarang.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab jarang adalah bahwa anggota BKM banyak yang tidak aktif sehingga berpengaruh terhadap pertemuan-pertemuan untuk mengungkap permasalahan masyarakat miskin.



Tabel IV. 52  
KEHADIRAN MASYARAKAT DALAM PERTEMUAN P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Banyak	5	14,3
Cukup banyak	14	40
Kurang banyak	13	37,1
Tidak banyak	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 40

Dari tabel IV. 52 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan P2KP untuk mengungkap permasalahan masyarakat miskin bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 40 % menjawab cukup banyak.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup banyak adalah pada saat terjadi pertemuan warga untuk membahas masalah kemiskinan terlebih dahulu diadakan pemetaan per kelompok untuk merefleksikan kemiskinan sehingga pada saat terjadi pertemuan untuk mengungkap permasalahan masyarakat miskin mereka banyak yang hadir karena kegiatan tersebut berlangsung secara bertahap yang melibatkan mereka.

Tabel IV. 53  
PEMILIHAN PRIORITAS MASALAH DIBUTUHKAN  
ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	5	14,3
Cukup baik	17	48,6
Kurang baik	15	42,9
Tidak baik	1	2,9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 41

Dari tabel IV. 53 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat pemilihan prioritas masalah yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota

kelompok masyarakat miskin dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab cukup baik

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup baik adalah P2KP dalam pelaksanaannya dimulai dari refleksi kemiskinan dengan metode FGD, kemudian diadakan pengungkapan masalah dan selanjutnya pemilihan prioritas masalah sehingga karena dari awal sudah dilakukan diskusi yang mendalam menjadikan pemilihan prioritas masalah tersebut hasilnya cukup baik.

Tabel IV. 54  
KONSISTENSI MASALAH DIPUTUSKAN DI FORUM BKM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Konsisten	2	5, 7
Cukup konsisten	17	48, 6
Kurang konsisten	13	37, 1
Tidak konsisten	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 42

Dari tabel IV. 54 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat konsistensi masalah diputuskan dalam forum BKM dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab cukup konsisten.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup konsisten adalah walaupun ada beberapa hal yang kurang konsisten mengenai masalah masyarakat miskin dalam Forum BKM yaitu menyangkut berubahnya sebagian lokasi sasaran kegiatan fisik tetapi sebagian besar masalah yang muncul mengenai masyarakat miskin konsisten diputuskan dalam Forum BKM.

Tabel IV. 55  
KEBERAGAMAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Beragam	2	5,7
Cukup beragam	16	45,7
Kurang beragam	14	40
Tidak beragam	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 43

Dari tabel IV. 55 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat keberagaman alternatif penyelesaian masalah masyarakat miskin yang muncul dalam proses pengambilan keputusan dari 35 responden, sebagian besar responden 45,7 % menjawab cukup beragam.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup beragam adalah walaupun ada sebagian kecil terdapat masalah yang alternatif pemecahannya kurang beragam tetapi sebagian besar alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan dalam pertemuan masyarakat miskin cukup beragam.

Tabel IV. 56  
INTENSITAS USULAN MASYARAKAT MISKIN DALAM  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIPERTEMUAN WARGA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Banyak	2	5,7
Cukup banyak	14	40
Kurang banyak	17	48,6
Tidak banyak	2	5,7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 44

Dari tabel IV. 56 dapat dijelaskan dilihat dari indikator tingkat keberagaman usulan alternatif penyelesaian masalah dari masyarakat miskin dalam pertemuan warga dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab kurang banyak.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang banyak adalah dalam pengambilan keputusan P2KP dilakukan melalui Forum BKM dimana dipertemuan tersebut dihadiri seluruh elemen warga masyarakat sehingga sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dan pengalaman masyarakat miskin maka mereka cenderung kurang aktif dalam forum tersebut.

Tabel IV. 57  
PRIORITAS MASALAH MASYARAKAT MISKIN  
DIPUTUSKAN DALAM PERTEMUAN WARGA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Besar	1	2, 9
Cukup besar	17	48, 6
Kurang besar	16	45, 7
Tidak besar	1	2, 9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 45

Dari tabel IV. 57 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat prioritas penyelesaian masalah masyarakat miskin dalam pertemuan warga dari 35 responden, sebagian besar responden 48, 6 % menjawab cukup besar.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup besar adalah walaupun terdapat masalah masyarakat miskin yang tidak menjadi prioritas masalah untuk diputuskan/ diberikan solusinya karena menyangkut masalah dana tetapi sebagian besar masalah masyarakat miskin diprioritaskan untuk dicari jalan keluarnya.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel proses pengambilan keputusan maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus di atas maka didapat  $i = 22-14/ 4 = 8/ 4 = 2$  , jadi maka  $i =$

2. Pengelompokan skor untuk variabel proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 58  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kategori Jawaban	Notasi	Nilai Interval
Tinggi	T	20, 03-22, 03
Cukup tinggi	CT	18, 02-20, 02
Kurang tinggi	KT	16, 01-18, 01
Rendah	R	14-16

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel proses pengambilan keputusan, yaitu:

Tabel IV. 59  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	5,7
Cukup tinggi	14	40
Kurang tinggi	10	28,6
Rendah	9	25,7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 39-45

Dari tabel IV. 59 rekapitulasi di atas mengenai variabel proses pengambilan keputusan sebagian besar 54,3 % menunjukkan kategori jawaban rendah (lihat lampiran).

Berdasarkan gambaran di atas tersebut maka secara umum proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan P2KP masih kurang berlangsung secara baik dan ini tentunya menggambarkan kurang mendukungnya variabel independen tersebut dalam mendukung daya kerja implementasi.

### C. 7. Hasil Proyek (X5)

Hasil proyek (X5) adalah sebagai sesuatu yang diadakan oleh proyek untuk memperoleh hasil yang ditimbulkan setelah proyek tersebut dijalankan. Berikut ini penyajian data dari jawaban-jawaban pertanyaan pada variabel hasil program, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 60  
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK  
DI LOKASI MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Meningkat	1	2, 9
Cukup meningkat	13	37, 1
Kurang meningkat	18	51, 4
Tidak meningkat	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 46

Dari tabel IV. 60 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur peningkatan sarana dan prasarana fisik di lokasi masyarakat miskin dengan adanya P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 51, 4 % menjawab kurang meningkat.

Alasan sebagian besar yang menjawab kurang meningkat adalah terdapat kegiatan fisik yang seharusnya dibangun di lokasi masyarakat miskin tetapi sebaliknya dibangun diperumahan karena kegiatan tersebut bergulir dengan angsuran, karena merasa takut tidak bisa melunasi angsuran sehingga di Forum BKM diputuskan di lokasi lain.

Tabel IV. 61  
HASIL PROYEK FISIK SESUAI DENGAN  
RENCANA YANG DITETAPKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	1	2,9
Cukup sesuai	10	28,6
Kurang sesuai	21	60
Tidak sesuai	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 47

Dari tabel IV. 61 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur hasil yang ditimbulkan secara fisik sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam pelaksanaan proyek dari 35 responden, sebagian besar responden 60 % menjawab kurang sesuai.

Alasan sebagian besar yang menjawab kurang sesuai adalah terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam proyek yaitu kegiatan perbaikan saluran di RW II karena swadaya masyarakat miskin kurang maka kemudian kegiatan fisik tersebut dipindah ke RW V.

Tabel IV. 62  
KEGIATAN SOSIAL MENGURANGI  
MASALAH SOSIAL MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengurangi	2	5,7
Cukup mengurangi	11	31,4
Kurang mengurangi	19	54,3
Tidak mengurangi	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 48

Dari tabel IV. 62 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat berkurangnya kebutuhan masyarakat miskin dengan adanya kegiatan sosial



dari P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang mengurangi .

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mengurangi adalah bahwa kegiatan bazar kebutuhan pokok yang telah dilaksanakan di Kelurahan Tlogomulyo hanya mampu sedikit mengurangi beban kebutuhan masyarakat miskin karena alokasi dana yang tidak besar dan itupun terbantu oleh swadaya masyarakat di wilayah Kelurahan Tlogomulyo.

Tabel IV. 63  
AKTUALISASI MASYARAKAT MISKIN  
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	5,7
Cukup tinggi	13	37,1
Kurang tinggi	19	54,3
Tidak tinggi	1	2,9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 49

Dari tabel IV. 63 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat aktualisasi masyarakat miskin dalam kehidupan sosial masyarakat dengan adanya P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 54,3 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah walaupun sering diberikan masukan mengenai pentingnya interaksi sosial dengan warga sekitar oleh anggota BKM yang aktif dan peduli dalam pelaksanaan P2KP tetapi mereka sering merasa minder berinteraksi dengan masyarakat yang lebih mapan sehingga mereka lebih suka berinteraksi dengan sesama komunitas masyarakat miskin.

Tabel IV. 64  
PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT MISKIN  
PENERIMA BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	2,9
Cukup tinggi	10	28,6
Kurang tinggi	21	60
Tidak meningkat	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 50

Dari tabel IV. 64 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat usaha masyarakat setelah mendapatkan bantuan proyek kegiatan ekonomi produktif dari 35 responden, sebagian besar responden 60 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah hanya terjadi peningkatan usaha sedikit saja karena bantuan modal usaha tidak begitu besar. Disamping itu mereka mengatakan mengalami kelesuan usaha karena modalnya sudah terpakai untuk biaya hidup sehari-hari sehingga angsurannya harus menunggu dalam beberapa bulan.

Tabel IV. 65  
KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	8,6
Cukup tinggi	11	31,4
Kurang tinggi	18	51,4
Tidak meningkat	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 51

Dari tabel IV. 65 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setelah mendapatkan bantuan P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 51,4 % menjawab kurang tinggi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang tinggi adalah karena modalnya hanya sedikit sehingga hanya terjadi peningkatan pendapatan yang sedikit pula.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel hasil proyek maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus di atas maka didapat  $i = 18-10/4 = 8/4 = 2$  , jadi maka  $i =$

2. Pengelompokan skor untuk variabel hasil proyek adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 66  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
HASIL PROYEK

Kategori Jawaban	Notasi	Nilai Interval
Tinggi	T	16, 03-18, 03
Cukup tinggi	CT	14, 02-16, 02
Kurang tinggi	KT	12, 01-14, 01
Rendah	R	10-12

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel hasil proyek, yaitu:

Tabel IV. 67  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
HASIL PROYEK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	5	14, 3
Cukup tinggi	11	31, 4
Kurang tinggi	11	31, 4
Rendah	8	22, 9
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 46-51

Dari tabel IV. 67 rekapitulasi penilaian variabel hasil proyek di atas dapat jelaskan dari 35 frekuensi sebagian besar 54, 3 % rendah (lihat lampiran). variabel hasil proyek cukup tinggi dan kurang tinggi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan hasil proyek yang ditimbulkan dari implementasi P2KP masih kurang baik bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tlogomulyo.

#### C. 8. Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6)

Kebutuhan kelompok sasaran (X6) adalah apa yang menjadi kebutuhan dari para anggota kelompok sasaran. Berikut ini penyajian data dari hasil jawaban-jawaban kuesioner variabel kebutuhan kelompok sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 68  
TERPENUHINYA KEBUTUHAN  
SARANA FISIK MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Terpenuhi	2	5, 7
Cukup terpenuhi	15	42, 9
Kurang terpenuhi	15	42, 9
Tidak terpenuhi	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 52

Dari tabel IV. 68 dapat dijelaskan dilihat dari indikator tingkat terpenuhinya kebutuhan sarana masyarakat miskin setelah mendapatkan proyek bahwa dari 35 responden, sebagian besar 51, 5 % menjawab kurang terpenuhi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab cukup terpenuhi adalah diwilayahnya dibangun sarana kegiatan fisik dalam pelaksanaan P2KP yang kebutulan wilayahnya cukup membutuhkan. Tetapi sebagian besar lagi beralasan bahwa kebutuhan akan sarana fisiknya kurang terpenuhi karena wilayahnya tidak dibangun sarana fisik P2KP dan wilayahnya akan dibangun sarana fisik tetapi dipindahkan kelokasi lain karena dana swadaya masyarakatnya kurang mencukupi.

Tabel IV. 69  
KEMUDAHAN MASYARAKAT MISKIN  
MENDAPATKAN AKSES EKONOMI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mudah	3	8, 6
Cukup mudah	14	40
Kurang mudah	15	42, 9
Tidak mudah	3	8, 6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 53

Dari tabel IV. 69 dapat dijelaskan dilihat dari indikator tingkat kemudahan penerima proyek untuk mendapatkan akses ekonomi bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden 42, 9 % menjawab kurang mudah.

Alasan sebagian besar yang menjawab kurang mudah adalah bahwa hampir sebagian besar penerima kredit P2KP digunakan untuk usaha dagang karena banyaknya kegiatan usaha tersebut walaupun sudah mendapat modal/ tambahan modal mereka mengalami kesulitan untuk membuka akses ekonomi.

Tabel IV. 70  
KEMUDAHAN PENERIMA PROYEK  
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA SENDIRI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mudah	3	8,6
Cukup mudah	14	40
Kurang mudah	15	42,9
Tidak mudah	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 53

Dari tabel IV. 70 dapat dijelaskan dilihat dari indikator tingkat kemudahan penerima proyek dalam menciptakan lapangan kerja sendiri dari 35 responden, sebagian besar responden 42,9 % menjawab kurang mudah.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang mudah adalah setelah mendapat bantuan P2KP mereka mendapat tambahan modal usaha tetapi mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena masing-masing berlomba-lomba untuk menjalankan usahanya.

Tabel IV. 71  
TERPENUHINYA KEBUTUHAN  
ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MISKIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Terpenuhi	5	14,3
Cukup terpenuhi	12	34,3
Kurang terpenuhi	14	40
Tidak terpenuhi	4	11,4
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 55

Dari tabel IV. 71 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur terpenuhinya kebutuhan penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat miskin dengan adanya P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 40 % menjawab kurang terpenuhi.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang terpenuhi adalah dalam implementasi P2KP setelah tahap kegiatan dilaksanakan jarang sekali diadakan pertemuan Forum BKM dan Rembug Warga karena sebagian besar anggota BKM tidak aktif. Kemudian kebutuhan partisipasi juga kurang terpenuhi karena kegiatan yang terjadi sekarang lebih pada kredit mikro yang kegiatannya melakukan angsuran perbulan, namun demikian secara umum dengan adanya P2KP kebutuhan akan aspirasi dan partisipasi terjadi sedikit peningkatan.

Tabel IV. 72  
KAPASITAS DIRI PRIBADI PENERIMA P2KP MENINGKAT  
DENGAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN ASPIRASI DAN  
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN P2KP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Meningkat	1	2,9
Cukup meningkat	15	42,9
Kurang meningkat	16	45,7
Tidak meningkat	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.56

Dari tabel IV. 72 dapat dijelaskan dilihat dari nilai ukur peningkatan kapasitas diri pribadi masyarakat miskin dengan terpenuhinya kebutuhan aspirasi dan partisipasi dalam pelaksanaan P2KP dari 35 responden, sebagian besar responden 45,7 % menjawab kurang meningkat.

Alasan sebagian besar responden yang menjawab kurang meningkat karena kebutuhan aspirasi dan partisipasi hanya sedikit terjadi peningkatan maka hanya terjadi sedikit peningkatan kapasitas diri.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel kebutuhan kelompok sasaran maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 18-8/ 4 = 10/ 4 = 2,5$  , jadi maka i = 2, 5. Pengelompokan skor tabel untuk variabel kebutuhan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 73  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN

Kategori Jawaban	Notasi	Nilai Interval
Tinggi	T	15, 53- 18, 03
Cukup tinggi	CT	10, 02-15, 52
Kurang tinggi	KT	10, 51-13, 01
Rendah	R	8-10, 5

Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel penelitian maka berikut ini tabel rekapitulasi hasil penilaian dari variabel kebutuhan kelompok sasaran, yaitu:



Tabel IV. 74  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	5,8
Cukup tinggi	13	37,1
Kurang tinggi	11	31,4
Rendah	9	25,7
Jumlah	35	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 52-56

Dari tabel IV. 74 rekapitulasi penilaian variabel kebutuhan kelompok sasaran di atas dapat dijelaskan variabel kebutuhan kelompok sasaran sebagian besar 57,1 % menunjukkan kategori jawaban rendah (lihat lampiran).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka variabel kebutuhan kelompok sasaran kurang terpenuhi dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo. Kondisi ini berarti menunjukkan daya kerja implementasi P2KP kurang tinggi karena kebutuhan kelompok sasarnya kurang terpenuhi.

### C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disajikan beberapa analisis yaitu analisis kuantitatif dalam bentuk tabulasi silang dan pengujian hipotesis untuk mengetahui hubungan diantara variabel-variabel penelitian dan analisis kualitatif untuk memperkaya hasil analisis kuantitatifnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tujuh (7) variabel yaitu daya kerja implementasi (Y), persyaratan proyek ( $X_1$ ), kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ), sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ), proses pengambilan keputusan ( $X_4$ ), hasil proyek ( $X_5$ ), dan kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ). Hipotesis yang diajukan penulis adalah :

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara persyaratan proyek ( $X_1$ ) dengan daya kerja implementasi (Y). Artinya bila tingkat persyaratan proyek memiliki skor yang positif maka daya kerja implementasinya juga akan bernilai positif. Begitu pula sebaliknya.
2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif kemampuan kerja organisasi pelaksana dalam mendukung daya kerja implementasi kebijakan maka akan semakin positif pula hasil daya kerja tersebut.
3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif sarana penyaluran aspirasi dalam mendukung daya kerja implementasi maka akan semakin positif pula daya kerja implementasi tersebut.

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif proses pengambilan keputusan dalam mendukung daya kerja implementasi maka akan semakin positif pula hasil daya kerja implementasi tersebut
5. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara hasil proyek (X5) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif hasil proyek dalam implementasi maka akan semakin positif pula daya kerja implementasi tersebut.
6. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif kebutuhan kelompok sasaran dalam implementasi maka akan semakin positif pula daya kerja implementasi tersebut.
7. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi. Semakin positif kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana dalam mendukung kebijakan maka akan semakin positif pula hasil daya kerja tersebut
8. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dalam mendukung daya kerja maka akan semakin positif pula hasil daya kerja tersebut

9. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesesuaian hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y). Semakin positif hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dalam mendukung daya kerja maka akan semakin positif pula hasil daya kerja tersebut
10. Terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2), kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4), serta kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (X6). Semakin positif semua variabel tersebut dalam mendukung daya kerja implementasi maka akan semakin positif pula daya kerja implementasi tersebut.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan sebelumnya maka berikut ini akan disajikan beberapa tabel silang dengan perhitungan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai analisis kuantitatif.

### C. 1. Analisis Kuantitatif

#### C. 1. 1. Hubungan antara Persyaratan Proyek ( $X_1$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) Di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara persyaratan proyek ( $X_1$ ) dengan daya kerja implementasi P2KP (Y) dalam proyek P2KP sebagai berikut :

Tabel IV. 75  
TABULASI SILANG ANTARA PERSYARATAN PROYEK ( $X_1$ )  
DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI P2KP (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Persyaratan Proyek ( $X_1$ )				Jumlah
	R	KT	CT	T	
<b>R</b>	6				6
	(85,7%)				( 17,4%)
<b>KT</b>	1	10	6		17
	(14,29%)	(83,33%)	(46,15%)		(49,3%)
<b>CT</b>		1	6		7
		(8,33%)	(46,15%)		(20,3%)
<b>T</b>		1	1	3	5
		(8,33%)	(7,69%)	(100%)	(14,5%)
<b>Jumlah</b>	7	12	13	3	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan persyaratan proyek tinggi sebesar 100 % menyatakan persyaratan proyek tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan persyaratan proyek cukup tinggi sebesar 46, 15 % menyatakan persyaratan proyek cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan persyaratan proyek kurang tinggi sebesar 83, 33 % menyatakan persyaratan proyek kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan persyaratan proyek rendah sebesar 85, 6 % menyatakan persyaratan proyek rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi.

#### C. 1. 2. Hubungan antara Kemampuan Organisasi Pelaksana ( $X_2$ ) dengan

##### Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) Di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara kemampuan organisasi pelaksana ( $X_1$ ) dengan daya kerja implementasi P2KP (Y) dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 76 sebagai berikut :

Tabel IV. 76  
TABULASI SILANG ANTARA  
KEMAMPUAN ORGANISASI PELAKSANA (X2) DENGAN  
DAYA KERJA IMPLEMENTASI P2KP (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2)				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	3	3			6
	(50%)	(21,43%)			(17,4%)
KT	3	10	4		17
	(50%)	(71,43%)	(40%)		(49,3%)
CT		1	4	2	7
		(7,14)	(40%)	(40%)	(20,3%)
T			2	3	5
			(20%)	(60%)	(14,5%)
Jumlah	6	14	10	5	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan kemampuan organisasi pelaksana tinggi sebesar 60 % menyatakan kemampuan organisasi pelaksana tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan kemampuan organisasi pelaksana cukup tinggi sebesar 40 % menyatakan kemampuan organisasi pelaksana cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan kemampuan organisasi pelaksana kurang tinggi sebesar 71, 43 % menyatakan kemampuan organisasi pelaksana kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden

yang menyatakan kemampuan organisasi pelaksana rendah sebesar 50 % menyatakan kemampuan organisasi pelaksana rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi.

### C. 1. 3. Hubungan antara Sarana Penyaluran Aspirasi ( $X_3$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ) dengan daya kerja implementasi P2KP (Y), dapat dilihat pada tabel IV. 77, sebagai berikut :

Tabel IV. 77  
TABULASI SILANG ANTARA SARANA PRNYALURAN  
ASPIRASI ( $X_3$ ) DENGAN DAYA KERJA  
IMPLEMENTASI P2KP (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Sarana Penyaluran Aspirasi ( $X_3$ )				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	4	2			6
	(36,36%)	(16,67%)			( 17,4%)
KT	6	9	2		17
	(54,54%)	(75%)	(22,22%)		(49,3%)
CT	1	1	4	1	7
	(9,09%)	(8,33%)	(44,44%)	(33,33%)	(20,3%)
T			3	2	5
			(33,33%)	(66,67%)	(14,5%)
Jumlah	11	12	9	3	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi



T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan sarana penyaluran aspirasi tinggi sebesar 66, 67 % menyatakan sarana penyaluran aspirasi tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan sarana penyaluran aspirasi cukup tinggi sebesar 44, 44 % menyatakan sarana penyaluran aspirasi cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan sarana penyaluran aspirasi kurang tinggi sebesar 75 % menyatakan sarana penyaluran aspirasi kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan sarana penyaluran aspirasi rendah sebesar 54, 54 % menyatakan sarana penyaluran aspirasi rendah dengan daya kerja implementasi kurang tinggi.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara sarana penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi.

C. 1. 4. Hubungan antara Proses Pengambilan Keputusan ( $X_4$ ) dengan  
 Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara proses pengambilan keputusan ( $X_4$ ) dengan daya  
 kerja implementasi P2KP (Y), dapat dilihat pada tabel IV. 78, berikut:

Tabel IV. 78  
 TABULASI SILANG ANTARA  
 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ( $X_4$ ) DENGAN  
 DAYA KERJA IMPLEMENTASI P2KP (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Proses Pengambilan Keputusan ( $X_4$ )				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	5	1			6
	(55,56%)	(10%)			(17,4%)
KT	3	9	5		17
	(33,33%)	(90%)	(35,71%)		(49,3%)
CT			7		7
			(50%)		(20,3%)
T	1		2	2	5
	(11,11%)		(14,29%)	(100%)	(14,5%)
Jumlah	9	10	14	2	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan proses pengambilan keputusan tinggi sebesar 100 % menyatakan proses pengambilan keputusan tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan proses pengambilan keputusan cukup tinggi sebesar 50 % menyatakan proses pengambilan keputusan cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan proses pengambilan keputusan kurang tinggi sebesar 90 % menyatakan proses pengambilan keputusan kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan proses pengambilan keputusan rendah sebesar 55, 56 % menyatakan proses pengambilan keputusan rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi.

#### C. 1. 5. Hubungan antara Hasil Proyek ( $X_5$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara hasil proyek ( $X_5$ ) dengan daya kerja implementasi (Y), dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 79 sebagai berikut :

Tabel IV. 79  
TABULASI SILANG ANTARA HASIL PROYEK (X1)  
DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI P2KP (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Hasil Proyek (X5)				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	5	1			6
	(62,5%)	(9,09%)			(17,4%)
KT	3	9	4	1	17
	(37,5%)	(81,82%)	(36,36%)	(20%)	(49,3%)
CT		1	6		7
		(9,09%)	(54,55%)		(20,3%)
T			1	4	5
			(9,09%)	(80%)	(14,5%)
Jumlah	8	11	11	5	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan hasil proyek tinggi sebesar 80 % menyatakan hasil proyek tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan hasil proyek cukup tinggi sebesar 54, 55 % menyatakan hasil proyek cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan hasil proyek kurang tinggi sebesar 81, 82 % menyatakan hasil proyek kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan hasil proyek rendah sebesar 62, 5 % menyatakan hasil proyek rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara hasil proyek dengan daya kerja implementasi.

#### C. 1. 6. Hubungan antara Kebutuhan Kelompok Sasaran ( $X_6$ ) dengan Daya

##### Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan antara kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ) dengan daya kerja implementasi P2KP (Y) dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 80 sebagai berikut :

Tabel IV. 80  
TABULASI SILANG ANTARA KEBUTUHAN KELOMPK  
SASARAN ( $X_6$ ) DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Kebutuhan Kelompok Sasaran ( $X_6$ )				Jumlah
	R	KT	CT	T	
<b>R</b>	6				6
	(66,67%)				(17,4%)
<b>KT</b>	3	9	5		17
	(33,33%)	(81,82%)	(38,46%)		(49,3%)
<b>CT</b>		1	6		7
		(9,09%)	(46,15%)		(20,3%)
<b>T</b>		1	2	2	5
		(9,09%)	(15,39%)	(100%)	(14,5%)
<b>Jumlah</b>	9	11	13	2	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan kebutuhan kelompok sasaran tinggi sebesar 100 % menyatakan kebutuhan kelompok sasaran tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan kebutuhan kelompok sasaran cukup tinggi sebesar 46, 15 % menyatakan kebutuhan kelompok sasaran cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan kebutuhan kelompok sasaran kurang tinggi sebesar 81, 82 % menyatakan kebutuhan kelompok sasaran kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan kebutuhan kelompok sasaran rendah sebesar 66, 67 % menyatakan kebutuhan kelompok sasaran rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase hubungan kesamaan tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi.

C. 1. 7. Hubungan Kesesuaian antara Persyaratan Proyek ( $X_1$ ) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana ( $X_2$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan kesesuaian antara persyaratan proyek ( $X_1$ ) dan kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ) dengan daya kerja implementasi P2KP (Y), dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 81 sebagai berikut :

Tabel IV. 81  
TABULASI SILANG HUBUNGAN KESESUAIAN ANTARA  
PERSYARATAN PROYEK (X1) DAN KEMAMPUAN ORGANISASI  
PELAKSANA (X2) DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2)				Jumlah
	R	KT	CT	T	
<b>R</b>	4	2			6
	(100%)	(11,76%)			(17,4%)
<b>KT</b>		14	3		17
		(82,36%)	(33,33%)		(49,3%)
<b>CT</b>		1	5	1	7
		(5,88%)	(55,56%)	(20%)	(20,3%)
<b>T</b>			1	4	5
			(11,11%)	(80%)	(14,5%)
<b>Jumlah</b>	4	17	9	5	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana tinggi sebesar 80 % menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana cukup tinggi sebesar 55, 56 % menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana kurang tinggi sebesar 82, 35 % menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana rendah sebesar 100 % menyatakan kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif antara kesesuaian persyaratan proyek dan kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi.

C. 1. 8. Hubungan Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi ( $X_3$ ) dan Proses Pengambilan Keputusan ( $X_4$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ) dan proses pengambilan keputusan ( $X_4$ ) dengan daya kerja implementasi (Y), dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 82 sebagai berikut :



Tabel IV. 82  
TABULASI SILANG HUBUNGAN KESESUAIAN ANTARA  
SARANA PENYALURAN ASPIRASI DAN PERSYARATAN  
PROYEK (X1) DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan (X4)				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	5	1			6
	(50%)	(9,09%)			(17,4%)
KT	5	8	4		17
	(50%)	(72,73%)	(33,33%)		(49,3%)
CT		1	6		7
		(9,09%)	(50%)		(20,3%)
T		1	2	2	5
		(9,09%)	(16,67%)	(100%)	(14,5%)
Jumlah	10	11	12	2	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan tinggi sebesar 100 % menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan cukup tinggi sebesar 50 % menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan kurang tinggi sebesar 72, 73 % menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan rendah sebesar 50 % menyatakan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi.

C. 1. 9. Hubungan Kesesuaian antara Hasil Proyek ( $X_5$ ) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran ( $X_6$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y) di Kelurahan Tlogomulyo

Hubungan kesesuaian antara hasil proyek ( $X_5$ ) dan kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ) dengan daya kerja implementasi (Y), dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 83 sebagai berikut :

Tabel IV. 83  
TABULASI SILANG HUBUNGAN KESESUAIAN ANTARA HASIL  
PROYEK (X5) DAN KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN (X6)  
DENGAN DAYA KERJA IMPLEMENTASI (Y)

Daya Kerja Implementasi (Y)	Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6)				Jumlah
	R	KT	CT	T	
R	5	1			6
	(83,33%)	(7,14%)			(17,4%)
KT	1	12	4		17
	(16,67%)	(85,72%)	(33,33%)		(49,3%)
CT		1	6		7
		(7,14%)	(50%)		(20,3%)
T			2	3	5
			(16,67%)	(100%)	(14,5%)
Jumlah	6	14	12	3	35
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

R = Rendah

KT = Kurang tinggi

CT = Cukup tinggi

T = Tinggi

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran tinggi sebesar 100 % menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran tinggi dengan daya kerja implementasi tinggi. Selanjutnya, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran cukup tinggi sebesar 50 % menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran cukup tinggi dengan daya kerja implementasi cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran kurang tinggi sebesar

85, 72 % menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran kurang tinggi dengan daya kerja implementasi kurang tinggi pula, sedangkan dari 100 % responden yang menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran rendah sebesar 83, 33 % menyatakan kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran rendah dengan daya kerja implementasi rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menandakan adanya kecenderungan hubungan dengan arah positif kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi.

## C. 2. Analisis Kualitatif

Berikut ini analisis kualitatif, berdasarkan alasan-alasan dari responden yang terdapat dikuesioner, adalah sebagai berikut:

Daya kerja implementasi P2KP masih belum maksimal dalam memberikan kegiatan fisik, kegiatan sosial dan kredit mikro, sarana dan prasarana, peningkatan pendapatan dan aktualisasi masyarakat miskin dalam bidang sosial. Kemudian P2KP dalam pelaksanaannya menyangkut kegiatan fisik terdapat kegiatan yang dilaksanakan di lokasi sasaran masyarakat miskin, belum mampu menimbulkan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya proyek pembangunan, persepsi masyarakat miskin masih belum positif terhadap proyek dan proyek belum secara maksimal menggerakkan partisipasi masyarakat miskin untuk terlibat dalam proyek pemerintah serta P2KP belum

mampu memberikan keyakinan bahwa proyek sifatnya bukan hibah. Kondisi ini menunjukkan daya kerja implementasi masih kurang baik.

Menyangkut masalah persyaratan proyek syarat teknis yang harus dipenuhi relatif banyak dan penerima proyek merasa enggan untuk memenuhi persyaratan tersebut karena untuk memenuhinya kurang mudah melaksanakannya. Persyaratan administrasi juga relatif sulit untuk dipenuhi karena jumlahnya relatif banyak sehingga menjadikan kesungguhan penerima proyek kurang tinggi. Kedua faktor ini jika ditelaah merupakan kondisi yang menjadikan salah satu faktor kurang baiknya daya kerja suatu idaya kerja implementasi P2KP.

Dalam kaitanya dengan kemampuan organisasi pelaksana ada beberapa hal yang menunjukkan kurang baiknya kemampuan organisasi pelaksana, kurang baiknya anggota BKM dalam menyampaikan informasi, intensitas penyampaian informasi P2KP masih jarang, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masih kurang, secara personal anggota BKM tingkat komitmen dan kepedulianya dalam memecahkan persoalan masyarakat miskin masih kurang . Disamping hal di atas tersebut ternyata para anggota BKM dan institusinya yang merupakan pelaku dalam organisasi proyek tidak ditunjang dukungan finansial yang memadai untuk melaksanakan kegiatan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor kurang baiknya daya kerja implementasi P2KP.

Sarana penyaluran aspirasi yang tersedia masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat miskin dan secara efektif masih belum mampu memenuhi keinginan masyarakat penerima proyek. Kemudian

menyangkut pada proses pengambilan keputusan terdapat masalah yang kurang konsisten dijadikan kegiatan, walaupun tingkat kehadiran masyarakat miskin cukup tinggi dalam proses pengambilan keputusan masyarakat miskin cenderung fasif pada saat berada diforum pengambilan keputusan. Kondisi ini menandakan adanya kesesuaian antara kedua variabel tersebut. Kemudian mempengaruhi dukunganya pada daya kerja implementasi itu sendiri.

Sementara itu menyangkut hasil proyek sarana fisik masyarakat miskin hanya terjadi sedikit peningkatan, hasil proyek kurang sesuai dengan rencana, kebutuhan sosial belum terjadi secara maksimal baik kebutuhan menyangkut aktualisasi maupun menyangkut beban kebutuhan sosial sehari-hari yaitu pangan. Hasil proyek belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kemudian menyangkut kebutuhan kelompok sasaran bahwa terdapat proyek fisik yang tidak tepat sasaran, akses ekonomi masih susah untuk dijangkau mengingat tambahan modal yang sedikit, kebutuhan aspirasi dan partisipasi masih belum terpenuhi secara maksimal serta peningkatan kapasitas diri masyarakat miskin masih kurang meningkat. Oleh karena itu, maka dapatlah dijelaskan bahwa hal terpenting adalah bahwa proyek yang dilaksanakan setidak-tidaknya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat sasaran sehingga hasil yang ingin dicapai dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sasaran tersebut. Jika secara nyata kedua faktor ini tidak dipertimbangkan kesesuaiannya maka akan kurang mendukung daya kerja implementasi itu sendiri.

### C. 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik Koefisien Korelasi Rank Kendall dan teknik statistik Konkordansi Kendall, berikut ini pengujian hipotesis dari penelitian penulis:

#### C. 3. 1. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Persyaratan Proyek ( $X_1$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara persyaratan proyek ( $X_1$ ) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $\tau_{X1} = 0,715$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,01$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara persyaratan proyek ( $X_1$ ) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata lain, antara persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi persyaratan proyek, maka akan semakin baik pula daya kerja implementasi suatu proyek.

C. 3. 2. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Kemampuan Organisasi Pelaksana ( $X_2$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $r_{X2} = 0,565$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,001, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata lain, antara kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi kemampuan organisasi pelaksana, maka akan semakin baik pula daya kerja implementasi suatu proyek.

C. 3. 3. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Sarana Penyaluran Aspirasi ( $X_3$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $r_{X3} = 0,599$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,001, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang



berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata lain, antara sarana penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi sarana penyaluran aspirasi, maka akan semakin baik pula daya kerja implementasi suatu proyek.

C. 3. 4. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Proses Pengambilan Keputusan (X<sub>4</sub>) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara proses pengambilan keputusan (X<sub>4</sub>) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $\tau_{X4} = 0,580$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,001, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara proses pengambilan keputusan (X<sub>4</sub>) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata lain, antara proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi proses pengambilan keputusan, maka akan semakin baik pula daya kerja implementasi suatu proyek.

C. 3. 5. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Hasil Proyek ( $X_5$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara hasil proyek ( $X_5$ ) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $\tau_{X5} = 0,738$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara hasil proyek ( $X_5$ ) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata lain, antara hasil proyek dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi hasil proyek, maka akan semakin baik pula daya kerja implementasi suatu proyek.

C. 3. 6. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Kebutuhan Kelompok Sasaran ( $X_6$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall antara kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ) dengan daya kerja implementasi (Y) sebesar  $\tau_{X6} = 0,736$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ) dengan daya kerja implementasi (Y)”. Dengan kata

lain, antara kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka akan semakin baik pula daya kerja suatu implementasi.

C. 3. 7. Analisis Chi-Square Test Kesesuaian antara Persyaratan Proyek (X1) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa hubungan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan dengan daya kerja implementasi (Y) adalah  $X^2 = 117,975$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “ terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan daya kerja implementasi (Y). Jadi hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat *diterima*.

C. 3. 8. Analisis Chi-Square Test Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi (X3) dan Proses Pengambilan Keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa hubungan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan adalah  $X^2 = 126,897$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dengan daya kerja implementasi (Y). Jadi hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat *diterima*.”

C. 3. 9. Analisis Chi-Square Test Kesesuaian antara Hasil Proyek (X5) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa hubungan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya kerja implementasi (Y) adalah  $X^2 = 145,850$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan daya

kerja implementasi (Y). Jadi hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat *diterima*.

C. 3. 10. Analisis Koefisien Konkordansi Kendall Kesesuaian antara Persyaratan Proyek ( $X_1$ ) dan Kemampuan Organisasi Pelaksana ( $X_2$ ), Kesesuaian antara Sarana Penyaluran Aspirasi ( $X_3$ ) dan Proses Pengambilan Keputusan, dan Kesesuaian antara Hasil Proyek ( $X_5$ ) dan Kebutuhan Kelompok Sasaran ( $X_6$ ) dengan Daya Kerja Implementasi P2KP (Y)

Perhitungan dengan rumus Koefisien Konkordansi Kendall dengan SPSS (Terlampir) memperlihatkan harga  $W = 0,876$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,001$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi” terdapat hubungan positif dan signifikan kesesuaian antara persyaratan proyek ( $X_1$ ), dan kemampuan organisasi pelaksana ( $X_2$ ), kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi ( $X_3$ ) dan proses pengambilan keputusan ( $X_4$ ), kesesuaian antara hasil proyek ( $X_5$ ) dan kebutuhan kelompok sasaran ( $X_6$ ) dengan daya kerja implementasi (Y). Jadi hipotesis yang diajukan *diterima*.

#### D. DISKUSI

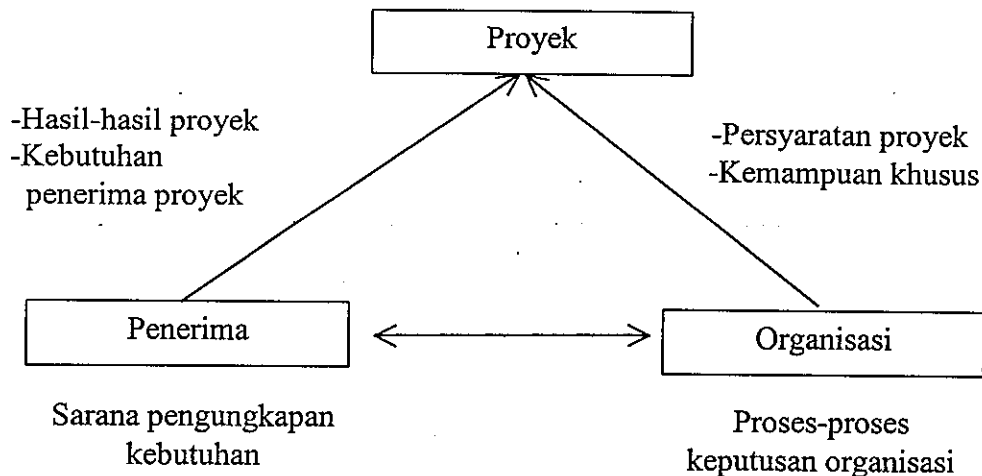
Diskusi merupakan bagian dalam bab ini dalam rangka mendialogkan hasil temuan dengan teori yang melandasi serta implikasi dari hasil penelitian dalam sebuah pemecahan masalah terhadap fokus penelitian yang dilakukan. Berikut ini hasil penelitian yang dapat didiskusikan, adalah sebagai berikut:

Sebelum membahas secara lebih lanjut mengenai bahasan diskusi terlebih dahulu penulis kemukakan teori yang menjadi landasan penelitian yaitu teori David C. Korten, adalah sebagai berikut:

Menurut David C. Korten (Sjahrir, 1988:261) bahwa pembangunan berdimensi kerakyatan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan materiil dan spirituil mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Dalam menentukan daya kerja proyek tidak hanya bertumpu pada satu sisi saja, tetapi memandang pada berbagai aspek yang saling berkaitan. Sebuah model kesesuaian (*The Fit Model*) disusun dengan pendekatan proses belajar. Model ini merupakan bentuk ideal yang dicapai oleh suatu program pembangunan yang berhasil. Gambaran skematis mengenai model kesesuaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar IV. 1  
SKEMA MODEL KESESUAIAN DAVID C. KORTEN



Sumber: Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan 1988

Selanjutnya menurut David C. Korten (Sjahrir, 1988: 240-242), bahwa:

Daya kerja suatu proyek pembangunan adalah fungsi dari kesesuaian antara kelompok sasaran, proyek dan pelaksana. Dengan istilah yang lebih khusus proyek pembangunan akan gagal memajukan suatu kelompok jika tidak ada hubungan erat antara pihak penerima proyek dengan hasil proyek, persyaratan proyek dengan kemampuan khusus dari organisasi pembantu dan sarana pengungkapan kebutuhan penerima proyek dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu.

Berdasarkan hal di atas tersebut maka selanjutnya penulis kemukakan beberapa hal yang menunjukkan adanya kondisi kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian. Beberapa hal yang menunjukkan kondisi kesesuaian tersebut bisa dilihat dari:

1. Diterimanya hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang merupakan analisis yang sifatnya kuantitatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 84  
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

No	Korelasi	Notasi/ Peringkat	Kesimpulan
1	Hubungan antara persyaratan proyek (X1) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX1Y (SPSS) = 0, 715 sig sebesar 0,000 < 0,001 (3)	Hipotesis diterima
2	Hubungan antara kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX2Y (SPSS) = 0, 565 sig sebesar 0,000 < 0,001 (6)	Hipotesis diterima
3	Hubungan antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX3Y (SPSS) = 0, 599 sig sebesar 0,000 < 0,001 (4)	Hipotesis diterima
4	Hubungan antara proses pengambilan keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX4Y (SPSS) = 0, 580 sig sebesar 0,000 < 0,001 (5)	Hipotesis diterima
5	Hubungan antara hasil proyek (X5) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX5Y (SPSS) = 0, 738 sig sebesar 0,000 < 0,001 (1)	Hipotesis diterima
6	Hubungan antara kebutuhan kelompok sasaran (X6) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	tX6Y (SPSS) = 0, 736 sig sebesar 0,000 < 0,001 (2)	Hipotesis diterima
7	Hubungan kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	Chi- Square (SPSS) = 117, 975 sig sebesar 0,000 < 0,001 (3)	Hipotesis diterima
8	Hubungan kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	Chi- Square (SPSS) = 126, 897 sig sebesar 0,000 < 0,001 (2)	Hipotesis diterima
9	Hubungan kesesuaian antara hasil proyek (X5) dan sasaran kebutuhan proyek (X6) dengan Daya Kerja Implementasi (Y)	Chi- Square (SPSS) = 145, 85 sig sebesar 0,000 < 0,001 (1)	Hipotesis diterima
10	Hubungan kesesuaian X1 dan X2, X3 dan X4 serta X5 dan X6 dengan Y	W (SPSS) = 0, 876 sig sebesar 0,000 < 0,001	Hipotesis diterima

Dari tabel di atas tersebut terlihat bahwa dalam hipotesis minor antara variabel tunggal (X dengan Y) bahwa variabel yang mempunyai hubungan yang paling positif dan signifikan secara berurutan yaitu (1) hasil proyek dengan daya kerja implementasi, (2) kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (3) persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi, (4) sarana



penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi, (5) proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (6) kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis minor dari kesesuaian antara variabel X dengan variabel Y yang mempunyai hubungan kesesuaian dengan daya kerja implementasi yang paling positif dan signifikan secara berurutan, yaitu (1) kesesuaian hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (2) kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (3) kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan pelaksana dengan daya kerja implementasi.

2. Hasil analisis kualitatifnya menunjukkan kondisi mendukung analisis kuantitatifnya, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 85  
HASIL ANALISIS KUALITATIF PENELITIAN

No	Variabel	Deskripsi	Kesimpulan
1	Daya Kerja proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan fisik, sosial dan kredit mikro masih belum maksimal peningkatannya</li> <li>- Kesadaran masyarakat miskin masih belum tumbuh secara baik</li> <li>- Persepsi masyarakat miskin masih belum positif terhadap P2KP</li> <li>- Partisipasi masyarakat miskin masih belum maksimal</li> <li>- Belum bisa memberikan keyakinan proyek tidak hibah</li> </ul>	Daya Kerja implementasi masih kurang baik
2	Kesesuaian antara persyaratan proyek (X1) dan kemampuan organisasi pelaksana (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan teknis relatif banyak dan masyarakat malas mengurusnya karena kurang mudah melaksanakannya</li> <li>- Persyaratan administrasi relatif sulit dipenuhi sehingga kesungguhan penerima program untuk memenuhinya kurang tinggi</li> <li>- Kemampuan organisasi pelaksana dalam menyampaikan informasi, intensitas penyampaian informasi, menggerakkan partisipasi, komitmen dan kepedulian anggota BKM kurang baik.</li> <li>- Dukungan finansialnya kurang.</li> </ul>	Kedua variabel saling berkesesuaian dan memberikan kontribusi pada kurang baiknya daya kerja implementasi
3	Kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi (X3) dan proses pengambilan keputusan (X4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana penyaluran aspirasi kurang dimanfaatkan penerima program dan kurang efektif memenuhi kebutuhan penerima program</li> <li>- Proses pengambilan keputusan terdapat masalah yang tidak konsisten dijadikan kegiatan proyek</li> <li>- Penerima program pasif dalam proses pengambilan keputusan</li> </ul>	Terjadi kesesuaian antara kedua variabel dan selanjutnya memberikan kontribusi positif bagi kurang baiknya daya kerja implementasi
4	Kesesuaian antara hasil program (X5) dan kebutuhan kelompok sasaran (X6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana fisik hanya terjadi sedikit peningkatan, hasil proyek kurang sesuai dengan rencana, kebutuhan sosial belum maksimal terpenuhi, hasil proyek belum mampu meningkatkan pendapatan</li> <li>- Terdapat proyek fisik yang tidak tepat sasaran, akses ekonomi masih susah dijangkau penerima proyek, kebutuhan aspirasi dan partisipasi masih susah terpenuhi dan kebutuhan terhadap pengembangan kapasitas pribadi penerima proyek belum muncul</li> </ul>	Kedua faktor menunjukan kesesuaian dan memberikan kontribusi positif bagi kurang baiknya daya kerja implementasi

3. Implikasi yang muncul apabila variabel-variabel dependen (X) tidak segera dilakukan perbaikan maka kemungkinan yang akan terjadi adalah akan mengakibatkan kondisi semakin memburuknya daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo dan ini tentunya akan berpengaruh pada kurang berhasilnya daya kerja implementasi proyek baik dilihat dari sisi proses maupun outputnya. Oleh karena itu, perbaikan terhadap variabel-variabel dependen penelitian untuk segera dilakukan dalam usaha memperbaiki suatu daya kerja implementasi untuk segera dilakukan dalam rangka menciptakan suatu daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo yang berhasil.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil penelitian peneliti yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **A. 1. Kesimpulan dari masing-masing variabel penelitian**

A. 1. 1. Variabel daya kerja implementasi masih kurang baik. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukkan kurang baiknya daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, adalah: (1) BKM kurang mampu dalam memberikan kegiatan fisik secara layak bagi penerima P2KP, (2) BKM kurang mampu dalam memberikan kegiatan sosial bagi penerima proyek, (3) BKM kurang mampu dalam memberikan kegiatan kredit mikro bagi penerima proyek, (4) kurang efektifnya P2KP dilaksanakan di lokasi sasaran, (5) P2KP kurang efektif dalam mengurangi beban kebutuhan masyarakat miskin, (6) P2KP kurang efektif dalam mengurangi permasalahan sarana dan prasarana fisik masyarakat miskin, (7) P2KP kurang efektif mengurangi kesulitan ekonomi penerima proyek, (8) persepsi penerima proyek kurang positif terhadap P2KP, (9) kurang tingginya kesadaran penerima proyek terhadap arti pentingnya P2KP, (10) kurang tingginya motivasi

penerima proyek untuk aktif dalam pelaksanaan P2KP, (11) organisasi proyek kurang mampu dalam memberi keyakinan pada penerima proyek bahwa proyek tidak hibah, (12) P2KP kurang berhasil dalam menggerakkan partisipasi penerima proyek untuk aktif dalam implementasi P2KP, dan (13) P2KP kurang berhasil dalam menambah kesadaran pennerima proyek mengenai kemampuan nya sendiri.

A. 1. 2. Variabel persyaratan proyek yang harus dipenuhi masih kurang baik. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukan kurang baiknya persyaratan proyek, adalah: (1) cukup memberatkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon penerima P2KP, (2) kurang mudahnya penerima proyek dalam memenuhi persyaratan teknis, (3) tingkat kesungguhan penerima proyek kurang tinggi dalam memenuhi persyaratan teknis, (4) persyaratan administrasi untuk mendapatkan proyek cukup banyak, dan (5) tingkat kesungguhan penerima proyek dalam memenuhi persayaratan administrasi kurang tinggi.

A. 1. 3. Variabel kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan proyek masih kurang memadai. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukan kurang baiknya kemampuan organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan P2KP di Kelurahan Tlogomulyo,

adalah: (1) tingkat kemampuan anggota BKM kurang baik dalam menyampaikan informasi P2KP, (2) tingkat intensitas anggota BKM kurang dalam memberikan informasi P2KP, (3) tingkat kemampuan anggota BKM kurang baik dalam menggerakkan partisipasi penerima proyek, (4) komitmen anggota BKM kurang kuat dalam memajukan tujuan penerima proyek, (5) kepedulian anggota BKM kurang tinggi dalam ikut serta memecahkan masalah penerima proyek, (6) tingkat dukungan finansial kurang memadai dalam mengimplementasikan P2KP, (7) tingkat insentif yang diterima pelaksana P2KP kurang layak dalam mengimplementasikan P2KP, dan (8) sarana dan prasarana yang diterima anggota BKM kurang menunjang dalam mengimplementasikan P2KP.

A. 1. 4. Varibel sarana penyaluran aspirasi dalam implementasi proyek proyek masih kurang efektif digunakan oleh penerima proyek. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukkan kurang efektifnya sarana penyaluran aspirasi dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, adalah: (1) kurang tahunya penerima proyek terhadap sarana-sarana penyaluran aspirasi kurang tahu, (2) tingkat keinginan penerima proyek dalam memanfaatkan sarana-sarana penyaluran aspirasi kurang tinggi, (3) sarana penyaluran

aspirasi kurang efektif dalam memperjuangkan aspirasi penerima proyek.

- A. 1. 5. Variabel proses pengambilan keputusan dalam implementasi proyek masih kurang efektif. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukkan kurang efektifnya proses pengambilan keputusan dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, adalah: (1). tingkat intensitas pertemuan untuk mengungkap permasalahan masyarakat miskin masih kurang dalam implementasi P2KP, dan (2) tingkat intensitas usulan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan masih kurang banyak.
- A. 1. 6. Variabel hasil proyek yang ditimbulkan dari implementasi kurang sesuai dengan tujuan-tujuan P2KP. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukkan kurang baiknya hasil proyek yang ditimbulkan dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, adalah: (1) kurang meningkatnya sarana dan prasarana fisik, (2) kurang sesuainya proyek fisik dengan rencana yang ditetapkan, (3) kegiatan sosial kurang mengurangi beban kebutuhan masyarakat miskin, (4) kurang tingginya aktualisasi masyarakat miskin dalam kehidupan sosial masyarakat, (5) P2KP kurang efektif dalam mengurangi

beban kebutuhan masyarakat miskin, (6). kurang tingginya peningkatan usaha setelah menerima bantuan kredit, dan (8) kurang terjadi peningkatan pendapatan.

A. 1. 7. Variabel kebutuhan kelompok sasaran masih kurang tepat sasaran dalam implementasi P2KP. Beberapa nilai ukur yang dianggap memberikan kontribusi positif yang menunjukkan kurang tepatnya kebutuhan kelompok sasaran dalam implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo, adalah: (1) kurang terpenuhinya kebutuhan fisik masyarakat miskin, (2). kurang mudahnya masyarakat miskin dalam mendapatkan akses ekonomi, (3) kurang mudahnya masyarakat miskin dalam menciptakan lapangan kerja sendiri, (4) kurang terpenuhinya kebutuhan aspirasi masyarakat miskin, dan (5) kurang meningkatnya kapasitas diri masyarakat miskin.

A. 2. Hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima.

A.3. Dalam hipotesis minor antara variabel tunggal (X dengan Y) bahwa variabel yang mempunyai mempunyai hubungan yang paling positif dan signifikan secara berurutan yaitu (1) hasil proyek dengan daya kerja implementasi, (2) kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (3) persyaratan proyek dengan daya kerja implementasi, (4) sarana penyaluran aspirasi dengan daya kerja implementasi, (5)



proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (6) kemampuan organisasi pelaksana dengan daya kerja implementasi.

A. 4. Hipotesis minor dari kesesuaian antara variabel X dengan variabel Y yang mempunyai hubungan kesesuaian yang paling positif dan signifikan secara berurutan, yaitu (1) kesesuaian hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi, (2) kesesuaian antara sarana penyaluran aspirasi dan proses pengambilan keputusan dengan daya kerja implementasi, dan (3) kesesuaian antara persyaratan proyek dan kemampuan pelaksana dengan daya kerja implementasi.

A. 5. Analisis kualitatif dari hasil penelitian mendukung analisis kuantitatifnya.

A. 6. Implikasi yang ditimbulkan apabila variabel-variabel dependen (X) tidak segera dilakukan perbaikan maka akan berpeluang pada semakin memburuknya daya kerja implementasi P2KP. Oleh karena itu maka perbaikan terhadap variabel-variabel x tersebut mutlak untuk dilakukan berdasarkan pada prioritasnya sesuai hasil pengujian hipotesis meliputi:

- a. Hasil proyek dengan daya kerja implementasi
- b. Kesesuaian hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran dengan daya kerja implementasi
- c. Perbaikan terhadap variabel lain sesuai dengan rangking hasil pengujian hipotesis baik hipotesis minor pada variabel tunggal maupun hipotesis minor pada variabel kesesuaian.

## B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan implementasi proyek P2KP di Kelurahan Tlogomulyo kedepan ataupun bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ada punya kepentingan dengan P2KP, bentuk-bentuk rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedepan bagi pembuat kebijakan P2KP diharapkan mengingat minimnya alokasi dana P2KP yang diberikan/ dipinjamkan kepada masyarakat miskin untuk menambah besarnya persentase alokasi dana P2KP yang secara khusus diperuntukan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan tersebut mendapatkan manfaat yang optimal bagi perbaikan sarana/ prasarana fisik, terpenuhinya kebutuhan yang sifatnya sosial dan peningkatan pendapatan ataupun taraf hidup kesejahteraannya meningkat. Artinya jika alokasi dana P2KP ditingkatkan kemungkinan yang terjadi adalah didapatkan hasil proyek yang lebih maksimal bagi masyarakat miskin.
2. Dalam rangka memperbaiki kesesuaian antara hasil proyek dan kebutuhan kelompok sasaran pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi P2KP untuk kembali melakukan reorientasi yang mempertimbangkan azas kemanusiaan dan keadilan (*equity*) yang berupa melakukan perubahan pada sebagian kegiatan dalam implementasi P2KP yaitu memilih dan memilah bentuk-bentuk kegiatan dengan sistem bergulir dan hibah. Bidang kegiatan yang mungkin perlu dihibahkan sesuai dengan master plannya yaitu kegiatan yang sifatnya fisik untuk tetap dikembalikan kepada kelompok sasaran

masyarakat miskin. Dengan adanya kegiatan proyek untuk masyarakat miskin diharapkan memberikan hasil yang maksimal pula bagi masyarakat miskin yang memang berhak terhadap proyek dalam bentuk kegiatan fisik tersebut. Maksud dari kegiatan yang sifatnya fisik tersebut dihibahkan adalah bahwa masyarakat miskin tersebut adalah masyarakat yang minim prasarana fisik, membutuhkan prasarana fisik serta cenderung tidak mampu membangun prasarana fisik seperti pavingisasi, sanitasi, pembangunan saluran air dan lain-lain. Namun demikian untuk proyek yang sifatnya kegiatan ekonomi tetap untuk dilaksanakan bergulir karena pada prinsipnya untuk membantu masyarakat miskin lain yang belum mendapatkan bantuan kredit dan untuk merangsang motivasi mereka dalam ber-usaha/ berdagang karena perbulan dikejar untuk membayar setoran.

3. Persyaratan teknis dan administratif bagi masyarakat miskin calon penerima P2KP untuk dipermudah yang sekiranya realistis untuk dipenuhi oleh mereka, berikut ini persyaratan teknis dan administratif yang sekiranya realistis untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin calon penerima P2KP:

□ Persyaratan teknis, meliputi:

- Telah diverifikasi oleh anggota BKM dan pengelola bidang kegiatan ekonomi.
- Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.
- Syarat menabung dipenuhi setelah 3 bulan menerima pinjaman kredit.

□ Persyaratan administratif, meliputi:

- Fotocopy KTP dan menunjukan aslinya

- Menandatangani surat perjanjian kredit dan tanggung renteng bersama.

4. Para anggota BKM diharapkan untuk mengaktifkan kembali sarana penyaluran aspirasi dan menjadi motivator bagi masyarakat miskin untuk menggunakan dan memanfaatkannya yang dianggap relevan bagi implementasi P2KP kedepan di Kelurahan Tlogomulyo hal ini penting dilakukan dalam usaha untuk membangkitkan kembali aspirasi, partisipasi dan sekaligus aktualisasi mereka sehingga dengan langkah yang sifatnya *learning by doing* tersebut secara bertahap terjadi pengembangan kapasitas dan peningkatan kapasitas diri pribadinya.
5. Dalam rangka pengambilan keputusan para anggota BKM, pelaksana bidang kegiatan P2KP, tokoh masyarakat dan serta elemen masyarakat lainnya di Kelurahan Tlogomulyo dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan stimulus-stimulus yang secara efektif membuat mereka terdorong untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan dan berfikir secara arif untuk selalu berorientasi bahwa P2KP dari pemerintah, oleh masyarakat miskin dan masyarakat umum serta untuk masyarakat miskin. Harapannya adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan untuk selalu berorientasi pada keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat miskin.
6. Dalam usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana proyek baik para anggota BKM maupun para pelaksana bidang kegiatan P2KP, maka diharapkan mengadakan pelatihan singkat menyangkut keahlian yang bersifat *komunikation skill*, kemampuan dalam melakukan pendekatan personal, kemampuan dalam manajemen program, kemampuan yang sifatnya

konseptual, teknis dan administratif. Artinya dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pelaksana P2KP dapat manajemen implementasi P2KP, dapat menyampaikan informasi-informasi secara lancar, jelas dan terperinci sehingga para penerima program mengerti dan paham tentang P2KP. Kemudian para pelaksana proyek juga dapat melaksanakan P2KP dengan kemampuan teknisnya, dapat mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif serta dapat melakukan pendekatan-pendekatan personal secara kepada para penerima proyek dengan kemampuan pendekatan personalnya. Pelatihan ini dilakukan secara singkat dengan biaya yang terjangkau, menggunakan metode pengenalan teori, FGD dan simulasi. Selanjutnya membuat standar indikator penilaian dalam rangka menilai aktivitas pelaksana proyek dalam menjalankan tugasnya dilapangan, sehingga nanti diketahui apakah dengan adanya pelatihan tersebut terjadi peningkatan kemampuan yang memadai dari para pelaksana proyek. Tenaga pelatih juga perlu dicarikan orang yang kompeten dan kredibel untuk kegiatan tersebut.

7. Institusi pelaksana proyek P2KP menyangkut subjek yang menjalankan proyek di Kelurahan Tlogomulyo perlu melakukan pendekatan komunitas secara intensif yang berupa bersilatuhrahmi kekoordinator Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) beserta anggotanya dengan mengadakan diskusi kecil melalui Forum Group Discussion (FGD) untuk merefleksikan kembali mengenai arti pentingnya proyek pembangunan, aspirasi dan partisipasi dengan harapan para penerima proyek akan mendapatkan persepsi positif mengenai arti pentingnya proyek pembangunan sehingga mereka akan

berpandangan positif terhadap P2KP kemudian secara sadar tergugah untuk ikut serta menyukseskan implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo.

8. Pendekatan personal perlu dilakukan sebagai langkah awal yang strategis kepada anggota Badan Swadaya Masyarakat yang tidak aktif untuk meyakinkan kembali mengenai kedudukan, peran dan tanggungjawab mereka sebagai pihak yang dipercaya menjadi wakil dari masyarakat miskin yang menopang implementasi P2KP. Pendekatan personal tersebut dengan strategi mendatangi *dor to dor* para anggota BKM kemudian melakukan interaksi yaitu proses pendekatan personal dengan melakukan analisis terhadap latar belakang ketidakaktifannya. Setelah tahap tersebut dilakukan lalu melakukan aksi berupa tindakan-tindakan menggugah kembali kepedulian dan komitmen mereka dalam ikut serta berperan aktif sebagai pelaksana P2KP.
9. Alokasi anggaran untuk manajemen proyek, insentif para anggota BKM (terutama yang masih aktif) dan para pelaksana bidang ekonomi diusahakan dinaikan dalam rangka memperbaiki implementasi dilapangan dan memberikan rangsangan/ motivasi para pelaksana proyek dalam menjalankan tugasnya memanajemen P2KP.
10. Dalam rangka studi implementasi kedepan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan serta menciptakan studi komparasi dengan teori yang penulis kemukakan maka dalam analisis teoritis terhadap sebuah fenomena sosial penulis lain diharapkan untuk meneliti daya kerja implementasi kebijakan terutama dalam bentuk proyek/ proyek untuk mengkajinya dengan teori daya kerja implementasi selain teorinya David C. Korten. Hal ini dilakukan

penting dalam meneliti fenomena sosial yang berhubungan dengan daya kerja implementasi kebijakan, semakin mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan teori yang dianggap relevan dengan objek yang akan diteliti tersebut.

Demikianlah beberapa saran yang sekiranya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi semakin baiknya daya kerja implementasi P2KP di Kelurahan Tlogomulyo maupun bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan studi implementasi kebijakan dalam bentuk program ataupun proyek.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Bryant, Caroline dan White, Louise. D, 1988, *Manajemen Pembangunan*, Terjemahan Rusyanto L Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Ciptono, Fandy, 1997, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Andi, Yogyakarta.
- Dun, Willian. N, 1992, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas. R, *Understanding Public Policy*, 1978, Pentice Policy, Pentice Hall, Englewood, Cliff, New Jersey.
- Denhart, Robert, 1995, *Public Administration, Action and Orientation*, Wordwort Publizing Company, Belmont.
- Dwianto, Agus, 1999, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, Makalah di Sampaikan pada Pelatihan-TMKR, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Edwards III, George, 1980, *Implementing Public Policy*. Cogressional Quartely, Press, N. W. Whashington. DC.
- Khairudin, 1992, *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor, Bandung.
- Siegel, Sidney, 1996, *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi; Sofian, 1982, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Meiode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Subana. M dan Sudrajat. S, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan V, Alfabeth, Bandung.
- Ghozali, Imam, 2002, *Statistik non Parametrik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.



Sumardi, Mulyanto dan Hans-Dieters Evers, 1982, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriatna, Tjahja, Prof, Dr, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 1982, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta.

Wahab, Abdul, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA NON BUKU

Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Pedoman Umum P2KP Tahap II, 2002, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, P2KP Pusat, Jakarta.

Pedoman Teknis P2KP Tahap II, 2002, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, P2KP Pusat, Jakarta.

Purbayu. Bs, 2003, *Hand Out Mata Kuliah Konsep dan manajemen Pembangunan*, Magister Administrasi Publik, Universitas diponegoro, Semarang, 2003.

UUD 1945 Setelah Amandemen Ke Empat Tahun 2002, 2002, Pustaka Setia, Bandung.

Webster New World: The Official Dictionary Of The Associated Press, 2001, Colege Dictionary, Editor Michael Agnes, IGG. Boks World Wide. Inc.